

**ANALISIS MEKANISME *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP PROBABILITAS
TERJADINYA *EARNINGS RESTATEMENT***



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

BAYU INDRA KUSUMA
NIM. 12030110151007

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

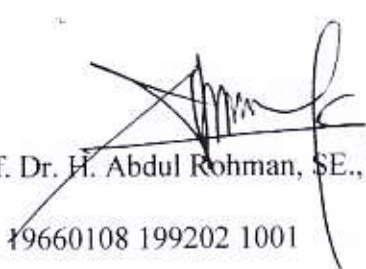
Nama Penyusun : Bayu Indra Kusuma
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110151007
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS MEKANISME *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP
PROBABILITAS TERJADINYA
*EARNINGS RESTATEMENT***

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, ~~24 Januari~~ 2014

Dosen Pembimbing,


(Prof. Dr. H. Abdul Rohman, SE., M.Si., Akt.)

NIP. 19660108 199202 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Bayu Indra Kusuma

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110151007

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS MEKANISME CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP
PROBABILITAS TERJADINYA
EARNING RESTATEMENTS**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 24 Oktober..... 2013.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, SE., M.Si., Akt.

2. Agung Juliarto, M.Si., Ph.D., Akt.

3. Aditya Septiani, SE., M.Si., Akt.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Bayu Indra Kusuma, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “ANALISIS MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PROBABILITAS TERJADINYA *EARNINGS RESTATEMENT*”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang,

(Bayu Indra Kusuma)

NIM. 12030110151007

ABSTRACT

This study seeks to examine the impacts of corporate governance on earnings restatement are indicated as a form of financial reporting failures on non-financial listed companies in Indonesia, with a view to providing reference to strengthen the corporate governance and improve the quality of financial information.

Data for this study were obtained from the annual reports of non-financial listed companies from the period of 2004 to 2010 with a total population of 2.146, which includes 34 restatements especially earnings restatement by 34 companies. A control sample comprising non-restating companies is formed using match-pair procedures where restated and non-restated companies are matched by fiscal year, industry sector, and company size. Logistic regression model was used to measure the restatements dummy variables. Moreover, dummy variables are also used not only on the composition of the board and the concentration of ownership, but also the quality of the independent auditor. Earnings restatement on this study focused on accounting misstatements and changes in accounting policies.

The results show that occurrence of restatements especially earnings restatement can be prevented by strong internal governance, such as the proportion of independent directors and the ownership of large shareholders are higher. They have better control than other element to monitoring and finding acts of fraud committed by management quickly and accurately. Surprisingly, the independence of the audit committee actually found a positive but not significant effect on the likelihood of higher restatements. The audit that have been done by Big 4 found a negative but not significant effect on the likelihood of restatements is lower. While the government ownership found a positive but not significant effect on high possibility of restatements.

Keywords: financial reporting failures, earnings restatement, agency problems, and corporate governance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *corporate governance* terhadap probabilitas terjadinya *earnings restatement* yang diindikasikan sebagai bentuk kegagalan pelaporan keuangan pada perusahaan *go public* non keuangan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan referensi guna memperkuat *corporate governance* dan meningkatkan kualitas dari informasi keuangan.

Data untuk penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan *go public* non keuangan dalam kurun waktu 2004 s/d 2010 dengan total populasi sebesar 2.146, yang meliputi 34 *restatements* khususnya *earnings restatement* yang dilakukan oleh 34 perusahaan. Sebuah sampel kontrol yang terdiri dari perusahaan yang tidak melakukan penyajian kembali dibentuk menggunakan *match-pair procedures* yang mana perusahaan tidak melakukan dan melakukan penyajian kembali dicocokkan berdasarkan tahun fiskal, sektor industri, dan ukuran perusahaan. Model regresi logistik digunakan untuk mengukur variabel dummy pada *earnings restatement*. Selain itu, variabel dummy juga digunakan tidak hanya pada komposisi dewan dan konsentrasi kepemilikan, tetapi juga kualitas dari auditor independen. *Earnings restatement* dalam penelitian ini difokuskan pada salah saji akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi.

Ditemukan bahwa terjadinya *restatements* khususnya *earnings restatement* dapat dicegah oleh internal *governance* yang kuat, seperti proporsi komisaris independen dan kepemilikan *large shareholders* yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan mereka memiliki kontrol yang lebih baik untuk melakukan pengawasan dan menemukan tindak kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dengan cepat dan akurat. Anehnya, independensi komite audit justru ditemukan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *restatements* yang lebih tinggi. Audit yang dilakukan KAP Big 4 ditemukan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *restatements* yang lebih rendah. Sedangkan kepemilikan pemerintah ditemukan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingginya kemungkinan *restatements*.

Kata Kunci: kegagalan pelaporan keuangan, *earnings restatement*, masalah agensi, dan *corporate governance*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puja dan puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROBABILITAS TERJADINYA EARNINGS RESTATEMENT”**, dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1), Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan dan saran berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
3. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing.
4. Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Wali.
5. Papa dan mama (Slamet M. Wazim dan Emi Endrastuti), kedua saudara tercinta, Vitri Dian Ekawati dan Wisnu Wirastomo, dan keponakan tercinta, Naura Aadzkiya Tifana.

6. Teman-teman Akuntansi Reguler 2 angkatan 2008 maupun Akuntansi Reguler 2 Lintas Jalur angkatan 2010 dan 2011.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik dapat disampaikan sehingga menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,

Penulis,

Bayu Indra Kusuma

MOTO

“... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan, yang ada pada diri mereka sendiri ...”

~ QS. 13 : 11 ~

“Ya Allah, jadikanlah kelapangan dan jalan keluar untukku dari setiap perkara yang membuatku sedih dan susah dalam urusan dunia serta akhiratku. Berilah aku rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ampunilah dosa-dosaku. Mantapkanlah harapanku pada-Mu, agar aku tidak pernah berharap kepada sesiapa pun selain Engkau.”

~ Yusuf Mansur ~

“Believe in your self and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.”

~ Christian D. Larson ~

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTO	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.5. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Landasan Teori	20
2.1.1. Teori Keagenan	20
2.1.2. Asimetri Informasi	21
2.1.3. Manajemen Laba	23

2.1.4. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia Mengenai Penyajian Kembali Laporan Keuangan (<i>Financial Restatements</i>)	24
2.1.5. Asimetri Informasi dan <i>Earnings Restatement</i> Sebagai Masalah Agensi	28
2.1.6. Mekanisme Untuk Mengurangi Masalah Agensi	30
2.2. <i>Corporate Governance</i>	31
2.2.1. Prinsip <i>Corporate Governance</i>	33
2.2.2. Komposisi Dewan	35
2.2.2.1. Komisaris Independen	35
2.2.2.2. Komite Audit	37
2.2.3. Konsentrasi Kepemilikan	39
2.2.4. Auditor Independen	40
2.3. Variabel Kontrol	46
2.3.1. Return on Assets (ROA)	46
2.3.2. Leverage (LEV)	47
2.3.3. Aset Turnover Ratio (ATO)	48
2.3.4. Firm Size (SIZE)	48
2.4. Penelitian Terdahulu	49
2.5. Kerangka Pemikiran	60
2.6. Pengembangan Hipotesis	64
2.6.1. Komposisi Dewan dan Probabilitas <i>Earnings</i> <i>Restatement</i>	64

2.6.2. Konsentrasi Kepemilikan dan Probabilitas <i>Earnings</i>	
<i>Restatement</i>	68
2.6.3. Audit Independen dan Probabilitas <i>Earnings</i>	
<i>Restatement</i>	71
BAB III METODE PENELITIAN	74
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	74
3.1.1. Variabel Dependen	74
3.1.2. Variabel Independen	77
3.1.2.1. Komposisi Dewan	77
3.1.2.1.1. Proporsi Komisaris Independen	77
3.1.2.1.2. Independensi Komite Audit	77
3.1.2.2. Konsentrasi Kepemilikan	78
3.1.2.2.1. <i>Large Shareholders</i>	78
3.1.2.2.2. Kepemilikan Pemerintah	78
3.1.2.3. Audit Independen	79
3.1.3. Variabel Kontrol	80
3.1.3.1. Return on Assets (ROA)	80
3.1.3.2. Leverage (LEV)	80
3.1.3.3. Aset Turnover Ratio (ATO)	81
3.1.3.4. Firm Size (SIZE)	81
3.2. Penentuan Populasi dan Sampel	81
3.3. Jenis dan Sumber Data	82
3.4. Metode Pengumpulan Data	82

3.5. Metode Analisis Data	83
3.5.1. Uji Hipotesis	83
3.5.2. Statistik Deskriptif	85
3.5.3. Analisis Tabulasi Silang (<i>Crosstab</i>)	85
3.5.4. Uji Multikolinieritas	86
3.5.5. Uji Kelayakan Model	86
3.5.6. Uji Kelayakan Keseluruhan Model	87
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	89
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	89
4.2. Analisis Data	91
4.2.1. Statistik Deskriptif	91
4.2.2. Analisis Tabulasi Silang (<i>Crosstab</i>)	95
4.2.3. Uji Multikolinieritas	98
4.2.4. Uji Kelayakan Model	98
4.2.5. Uji Kelayakan Keseluruhan Model	100
4.2.6. Koefisien Determinasi	101
4.2.7. Model Regresi Logistik	102
4.2.8. Matriks Klasifikasi	105
4.3. Pembahasan	106
4.3.1. Proporsi Komisaris Independen dan Probabilitas <i>Earnings Restatement</i>	106
4.3.2. Independensi Komite Audit dan Probabilitas <i>Earnings</i> <i>Restatement</i>	108

4.3.3. <i>Large Shareholders</i> dan Probabilitas <i>Earnings</i>	
<i>Restatement</i>	111
4.3.4. Kepemilikan Pemerintah dan Probabilitas <i>Earnings</i>	
<i>Restatement</i>	113
4.3.5. Audit Independen dan Probabilitas <i>Earnings</i>	
<i>Restatement</i>	115
BAB V PENUTUP	118
5.1. Kesimpulan	118
5.2. Keterbatasan	121
5.3. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A - Daftar Sampel Perusahaan <i>Go Public</i> Non Keuangan	131
Lampiran B - Tabulasi Data	138
Lampiran C - Output Spss	141

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	53
Tabel 4.1. Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria	90
Tabel 4.2. Analisis Statistik Deskriptif KOMIND, BLOCK, ROA, LEV, ATO, dan SIZE	91
Tabel 4.3. Analisis <i>Crosstab</i> Independensi Komite Audit	95
Tabel 4.4. Analisis <i>Crosstab</i> Kepemilikan Pemerintah	96
Tabel 4.5. Analisis <i>Crosstab</i> Audit independen	97
Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinieritas	98
Tabel 4.7. <i>Hosmers and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i>	99
Tabel 4.8. Perubahan Nilai <i>-2 Log Likelihood</i>	100
Tabel 4.9. <i>Onimbus Test of Model Coefficient</i>	101
Tabel 4.10. Nilai R^2	101
Tabel 4.11. Hasil Uji Regresi Logistik	102
Tabel 4.12. Hasil Uji Matriks Klasifikasi	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Model Kerangka Pemikiran	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar korporasi. Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil, namun disisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba atau *earnings management* (Rahmawati dkk., n.d.).

Tindakan *restatements*, terutama *earnings restatement*, adalah contoh tindakan agresif manajemen laba dengan memanfaatkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal. US General Accounting Office atau GAO (2002) menilai bahwa *financial restatements* adalah indikator yang paling mudah untuk diobservasi dan merupakan sumber investigasi baru yang digambarkan melalui salah saji akuntansi. Agrawal dan Chadha (2005) menyatakan bahwa apabila intensitas *earnings restatement* yang terjadi terus meningkat, dapat menimbulkan kekhawatiran investor terhadap keandalan laba itu sendiri. Zhingzhong *et al.*

(2011) menyatakan bahwa lemahnya pengawasan internal perusahaan adalah penyebab utama atas meluasnya kegagalan pelaporan keuangan ini.

Pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan pelaporan keuangan ini dapat dilihat dalam konteks Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 6 yang menyatakan bahwa tanggung jawab laporan keuangan adalah manajemen. SA Seksi 333 (IAPI, 2011) pun menyatakan hal yang sama, dimana manajemen diharuskan membuat pernyataan tertulis yang mencakup:

1. Laporan Keuangan,
 - a. Pengakuan manajemen mengenai tanggung jawabnya untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - b. Keyakinan manajemen bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang bertindak sebagai regulator di pasar modal Indonesia dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-06/PM/2000 Peraturan Nomor VIII.G.7 juga menyatakan hal yang sama. Manajemen emiten atau perusahaan publik bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta pentingnya penerapan *corporate governance* untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Pernyataan yang bersifat tertulis bisa dilihat dalam Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan yang dijelaskan pada halaman berikutnya.

1. Tanggung jawab manajemen atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Pernyataan tertulis manajemen bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Semua informasi dalam keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar, laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Tanggung jawab manajemen atas sistem pengendalian interen dalam perusahaan.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan yang merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan termasuk didalamnya sistem pengendalian interen perusahaan adalah tanggung jawab manajemen. Tindakan *financial restatements*, terutama *earnings restatement*, bagaimanapun juga adalah bentuk nyata intervensi manajemen terhadap proses pelaporan keuangan. Inilah yang menjadikan dasar bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan dengan menguji beberapa variabel mekanisme *corporate governance*, baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan terhadap probabilitas terjadinya *earnings restatement* pada perusahaan *go public* non keuangan di Indonesia.

Penyebab perusahaan melakukan *restatements* sebenarnya sangat beragam, terutama jika melibatkan tindak kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. SA Seksi 316.2 (IAPI, 2011) bahwa salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah salah saji atau penghilangan secara

sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. IAPI (2011) menjelaskan bahwa kecurangan dalam laporan keuangan itu dapat menyangkut tindakan-tindakan seperti:

1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi, atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
2. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan.
3. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Selain itu, salah saji dalam laporan keuangan juga bisa disebabkan oleh meningkatnya kompleksitas standar akuntansi, lingkungan peraturan yang dinamis, atau perubahan dari kegiatan bisnis. Pada level ini manajemen dituntut untuk dapat mengelola kompleksitas tersebut dan mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dewan direksi, auditor, regulator, pemegang saham, dan pemilik kepentingan lainnya. Meskipun tentunya ini dapat memakan waktu yang cukup lama dan menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen (PwC, n.d.).

Meskipun *financial restatements* dimaksudkan untuk memberikan informasi keuangan yang lebih akurat dengan harapan yang lebih baik untuk melindungi kepentingan investor, manajemen juga dapat melancarkan tindakan untuk menguntungkan dirinya sendiri. *Financial restatements* dipandang sebagai cermin kredibilitas perusahaan yang buruk dan rendahnya kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Anderson dan Yohn, 2002). Selain itu, kualitas

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diragukan kualitasnya ketika perusahaan itu melakukan *earnings restatement* (Richardson *et al.*, 2002; Akhigbe *et al.*, 2005). Apabila kejadian seperti ini terus berulang dan meningkat, tentunya dapat menimbulkan efek negatif bagi perusahaan-perusahaan lainnya, seperti membangkitkan kecurigaan publik kepada akuntan dan menurunkan kepercayaan investor di pasar modal (Wu, 2003).

PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut KAEF sesuai dengan kode *listing*) adalah contoh kasus manipulasi laporan keuangan di Indonesia. KAEF adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya telah diperdagangkan di bursa. Berdasarkan indikasi oleh Kementerian BUMN dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut Bapepam-LK), ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang mengakibatkan lebih saji (*overstated*) laba bersih untuk tahun buku 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba neto. Salah saji ini terjadi dengan cara melebihiajikan penjualan dan persediaan pada 3 unit usaha dan dilakukan dengan menggelembungkan harga persediaan yang telah diotorisasi oleh Direktur Produksi, untuk menentukan nilai persediaan pada unit distribusi per 31 Desember 2001. Selain itu, manajemen juga melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada 2 unit usaha. Pencatatan tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor eksternal.

Bapepam-LK (2002) menarik kesimpulan bahwa auditor eksternal telah melakukan prosedur audit sampling sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan. Selain itu,

Bapepam-LK juga menyatakan bahwa proses audit yang dilakukan tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan KAEF. Atas temuan ini, Bapepam-LK memberikan sanksi administratif sebesar Rp 500 juta kepada KAEF, Rp 1 milyar terhadap direksi lama KAEF, dan Rp 100 juta kepada auditor eksternal sebagai bagian kegagalan dalam mendeteksi risiko audit.

US General Accounting Office atau GAO (2002) percaya bahwa *restatements* yang terjadi sampai dengan batas tertentu mencerminkan akan lemahnya praktik *corporate governance*. Oleh karena itu, *financial restatements* adalah perspektif baru dan penting untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari penerapan praktik *corporate governance*. Wikipedia (n.d.) mengungkapkan bahwa kasus besar *financial restatements* yang disebabkan oleh *pervasive accounting* dan *financial irregularities*, seperti kasus Enron dan WorldCom di Amerika Serikat, telah memaksa regulator untuk mengambil langkah-langkah koreksi dan pencegahan, yaitu dengan menerbitkan hukum federal yang dikenal dengan Sarbanes Oxley-Act (selanjutnya disebut SOX). Perundang-undangan ini muncul sebagai tanggapan atas sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar yang telah menyebabkan kerugian bilyunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan di pasar modal serta mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional.

Penerapan praktik *corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akhirnya bisa meningkatkan daya informasi akuntansi. Dalam kaitannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang

mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan (Kieso dan Weygandt dalam Ujiyanto, 2007). Menurut Theresia dalam Ujiyanto (2007) manajemen laba merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Manajemen bisa memilih metode tertentu untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan motivasinya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kualitas kinerja yang dilaporkan oleh manajemen (Gideon dalam Ujiyanto, 2007).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25, Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi (IAI, 2009) menyatakan bahwa laporan laba rugi yang merupakan bagian dari laporan keuangan, digunakan untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan.

Informasi tersebut juga sering kali digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas dan aset yang disamakan dengan kas di masa depan. Selain itu, jumlah laba yang diperoleh perusahaan turut menentukan jumlah *return* yang akan diterima oleh pemegang saham melalui pembagian dividen. Jensen dan Meckling (1976) melalui teori keagenan menjelaskan bahwa penilaian kinerja manajemen yang didasarkan pada laporan keuangan dapat memicu perilaku oportunistik manajemen dengan memanfaatkan

adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Inilah yang kemudian memicu angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi lebih atraktif.

Zhingzhong *et al.* (2011) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen yang lebih besar, dapat secara efektif mengawasi gerak-gerik agen agar bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Tetapi semakin besar perusahaan, tentunya kebutuhan akan pihak ketiga yang independen menjadi berbeda antara perusahaan satu dengan lainnya. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 mewajibkan bahwa setiap emiten atau perusahaan publik setidaknya memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS.

Komite audit yang independen juga diwajibkan oleh regulator (Bapepam-LK) dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 yang menyatakan bahwa komite audit harus terdiri dari sekurang-kurangnya satu komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan *go public*. Keberadaan pihak ketiga yang independen dalam komite audit bertujuan untuk memastikan kualitas dari informasi yang tersaji dalam laporan keuangan itu sendiri, baik dan cukup dalam mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Independen berarti bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif (KNKG, 2006). Jika kualitas dan karakteristik komite audit tercapai, maka

transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal.

Dechow *et al.* (1996), Farber (2005), Peng dan Yang (2006), Yang dan Yang (2006), dan Zhingzhong *et al.* (2011) menyatakan bahwa keberadaan komite audit memiliki korelasi langsung terhadap kemungkinan terjadinya *restatements*. Sesuai dengan teori keagenan, keterlibatan pihak ketiga diluar perusahaan mampu membantu masalah agensi yang terjadi antara prinsipal dan agen. Akan tetapi, Agrawal dan Chadha (2005) menemukan hasil yang berbeda. Ditemukan bahwa keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh dengan kemungkinan terjadinya *restatements*. Selain itu, Agrawal dan Chadha (2005) juga menemukan adanya relevansi ketidakandalan laba yang dilaporkan seiring dengan meningkatnya *earnings restatement*.

Abdullah *et al.* (2010) menemukan alasan utama salah saji dalam laporan keuangan adalah untuk memanipulasi laba. Secara mengejutkan, komite audit yang independen ditemukan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *restatements*. Artinya, komite audit yang independen memiliki andil terhadap kemungkinan terjadinya *restatements* yang lebih tinggi meskipun bukan merupakan faktor utama. Selain itu, kepemilikan *outside shareholders* dalam jumlah yang besar memiliki korelasi langsung terhadap kemungkinan terjadinya *restatements*. Akan tetapi, Abott *el al.* (2003) dan Agrawal dan Chadha (2005) justru menemukan hasil yang berbeda. Ditemukan bahwa kepemilikan *outside large shareholders* tidak memiliki korelasi langsung terhadap kemungkinan terjadinya *restatements*.

Farber (2005), Abdullah *et al.* (2010), dan Zhingzhong *et al.* (2011) menemukan bahwa perusahaan *go public* yang diaudit oleh KAP Big 4 ternyata memiliki probabilitas yang lebih rendah terhadap terjadinya *restatements*. Namun hasil yang berbeda diperoleh Dechow *et al.* (1996) dan Agrawal dan Chadha (2005). Ditemukan bahwa kemungkinan terjadinya *restatements* tidak memiliki korelasi dengan audit independen yang dilakukan oleh KAP, sekalipun proses audit dilakukan oleh KAP Big 4. Biaya dan waktu audit yang terbatas mengakibatkan audit hanya didasarkan pada sejumlah sampel. Ini bisa mengakibatkan yang serius ketika manajemen melakukan manipulasi pada transaksi yang tidak menjadi ruang lingkup sampel yang akan diaudit oleh auditor. Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. adalah contoh nyata bagaimana manajemen melakukan hal tersebut.

Studi empiris untuk mengkaji bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap probabilitas terjadinya *financial restatements* menjadi semakin menarik, ketika Zhingzhong *et al.* (2011) menyertakan kepemilikan pemerintah dalam perusahaan *go public* di Cina. Ditemukan bahwa kepemilikan pemerintah dalam perusahaan BUMN *go public* memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *restatements* yang lebih tinggi. Fama (1980) menyatakan bahwa sebagai agen dalam kepemilikan pemerintah, direksi yang mengelola berbagai perusahaan juga berfungsi sebagai pejabat di berbagai tingkat pemerintahan sehingga mereka tidak memiliki motivasi yang memadai untuk secara efektif memonitor dan mengevaluasi manajemen.

Zhingzhong *et al.* (2011) menyatakan bahwa peran mereka sebagai manajer puncak perusahaan dan juga seorang politisi, mereka tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi, tetapi juga promosi politik. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk bergaul dengan pejabat pemerintah dari tingkat yang lebih tinggi sehingga mereka kurang memperhatikan operasional perusahaan. Karena kinerja perusahaan juga merupakan salah satu kriteria penilaian mereka untuk promosi, tidak mengherankan ketika masa jabatan berakhir, mereka memiliki motivasi yang kuat untuk melebih-lebihkan laba.

Kepemilikan pemerintah yang besar dalam perusahaan BUMN *go public* (diatas 51%), menjadikan mereka sebagai *large shareholders* dalam perusahaan memang menjadi polemik tersendiri. Peran mereka yang diharapkan lebih efektif dalam memonitor dan mengevaluasi manajemen, justru diperoleh hasil yang sebaliknya. Zhingzhong *et al.* (2011) menyatakan bahwa tingkat kepemilikan *large shareholders* (selain kepemilikan pemerintah) memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *restatements* yang lebih rendah. Artinya, dengan kepemilikan mereka yang besar, mereka memiliki insentif yang cukup dan memadai untuk memantau dan mengevaluasi manajemen. Sehingga terjadinya *restatements* diharapkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat kepemilikan tersebar.

Mengingat dampak signifikan yang ditimbulkan, khususnya bagi perusahaan *go public*, *financial restatements*, khususnya *earnings restatement* adalah masalah yang sangat penting dan telah mendapat banyak perhatian dari akademisi, peneliti, regulator, dan praktisi. Adanya *research gap* dan penelitian

yang umumnya dilakukan di negara maju serta minimnya penelitian yang dilakukan di negara berkembang, membuat peneliti tertarik untuk mengambil topik ini. Studi empiris dalam kurun waktu tahun 2004 s/d 2010 dilakukan untuk memperoleh bukti empiris bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap probabilitas terjadinya *earnings restatement* yang diindikasikan sebagai bentuk kegagalan pelaporan keuangan pada perusahaan *go public* non keuangan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan referensi guna memperkuat *corporate governance* dan meningkatkan kualitas dari informasi keuangan.

Penelitian ini adalah replikasi atas penelitian Zhingzhong *et al.* (2011) di Cina dan sampel yang digunakan adalah perusahaan *go public* non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel dependen yang diujikan dalam penelitian ini, yaitu *financial restatements*, difokuskan hanya sebatas pada perusahaan yang melakukan *earnings restatement*. Zhingzhong *et al.* (2011) mengungkapkan bahwa terjadinya salah saji akuntansi dan niat oportunistik manajemen memiliki korelasi langsung dengan kegagalan *corporate governance* yang berujung pada kegagalan pelaporan keuangan.

Kegagalan pelaporan keuangan ini dicerminkan melalui intensitas perusahaan dalam melakukan *earnings restatement* yang merupakan indikasi manajer melakukan manajemen laba. Jika hal tersebut disebabkan oleh salah saji akuntansi, *earnings restatement* berarti bahwa laporan keuangan yang telah disajikan sebelumnya mengandung salah saji material sehingga keandalan informasi keuangan (laba) tidak bisa diandalkan dan menyesatkan.

Terdapat 5 perbedaan sebagai bentuk penyesuaian dan modifikasi akibat perbedaan kondisi pasar modal. Perbedaan pertama yaitu mengenai periode tahun buku yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan periode tahun buku yang lebih panjang, yaitu untuk periode tahun buku yang berakhir 2004 s/d 2010 guna memberikan gambaran terkini mengenai praktik *corporate governance* di Indonesia. Perbedaan kedua terletak pada konsentrasi kepemilikan, yaitu kepemilikan pemerintah. Terdapat 3 klasifikasi kepemilikan pemerintah di Cina, yaitu State Assets Administration Committee (SAAC), State Assets Administration Company (SAAC), dan kepemilikan langsung atas nama pemerintah. Sedangkan di Indonesia, kepemilikan pemerintah hanya dicerminkan atas nama Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Perbedaan ketiga, (masih dalam konsentrasi kepemilikan), yaitu mengenai jenis saham yang diperdagangkan. Pasar modal di Cina memperdagangkan 3 jenis saham, yaitu saham A, saham B, dan saham H. Perbedaan ketiganya selain tempat perdagangannya adalah jenis kepemilikan yang melekat. Saham A secara khusus diperdagangkan dalam mata uang Cina dan dikhususkan bagi investor dalam negeri. Saham B secara khusus diperdagangkan dalam mata uang asing bagi investor luar. Saham H secara bebas diperdagangkan bagi semua investor. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan saham A, B, dan H adalah pihak luar yang memiliki sejumlah saham dalam perusahaan, atau lebih dikenal dengan *outside shareholders*.

Peneliti beragumen bahwa kepemilikan *outside shareholders* akan dieliminasi dengan asumsi bahwa kepemilikan *large shareholders* memberikan

gambaran yang lebih baik untuk mewakili kepemilikan saham oleh pihak diluar perusahaan. Cheng dan Reitenga (2001) menemukan bukti bahwa pemegang saham institusional aktif lebih tertarik pada kinerja jangka panjang dan memiliki kekuatan yang lebih baik untuk memonitor manajemen dibandingkan pemegang saham institusional non-aktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemegang saham institusional aktif berperan sebagai *large shareholders* dalam sebuah perusahaan sehingga mereka dapat melakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik terhadap manajemen.

Perbedaan keempat yaitu mengenai variabel komite audit. Zhingzhong *et al.* (2011) membahas isu mengenai keberadaan komite audit pada perusahaan *go public* di Cina. Sedangkan dalam penelitian ini, isu independensi diangkat sebagai prasyarat penting komite audit dalam menjalankan perannya. Hal ini disebabkan telah diterbitkannya peraturan Bapepam-LK melalui SE Bapepam-LK Nomor 03 tahun 2000, Keputusan Direksi BEJ Nomor 339 tahun 2001, dan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, yang menyatakan bahwa perusahaan *go public* wajib membentuk komite audit.

Selain itu, isu independensi dipilih karena faktor independensi merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh komite audit. Kolins *et al.* (1991) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin independen komite audit, semakin besar kemungkinan untuk dapat melakukan pengawasan pelaporan keuangan secara lebih efektif dan menjamin objektivitas. Independen berarti bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif (KNKG, 2006).

Jika kualitas dan karakteristik komite audit tercapai, maka transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal.

Perbedaan kelima adalah batasan sampel perusahaan yang akan diujikan. Zhingzhong *et al.* (2011) membatasi *earnings restatement* hanya sebatas yang disebabkan oleh salah saji akuntansi. Jika mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25, Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi (IAI, 2009), maka salah saji akuntansi dapat didefinisikan sebagai kesalahan yang mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Penelitian ini memperluas batasan sampel yang digunakan dengan menyertakan perusahaan yang melakukan perubahan kebijakan akuntansi. *Earnings restatement* yang disebabkan oleh peraturan perundangan, penerapan suatu standar akuntansi keuangan, *stock split*, dan *restatements* lainnya yang tidak dibuat untuk memperbaiki kesalahan akan dieliminasi. Selain itu, pertimbangan yang mendasari untuk memperluas batasan sampel adalah adanya intervensi manajemen dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan dengan tujuan tertentu, seperti memilih metode akuntansi yang digunakan. Inilah yang mengindikasikan adanya manajemen laba melalui sebuah pertimbangan (*judgment*) yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah peristiwa ekonomi di masa depan serta kemudahan manajemen untuk memilih penerapan suatu metode akuntansi tertentu.

Adapun kesamaan dalam penelitian ini adalah pengujian variabel independen yang terdiri dari proporsi komisaris independen, tingkat kepemilikan *large shareholders*, kepemilikan pemerintah, dan audit independen. Variabel kontrol yang sama pun turut diujikan dalam penelitian ini, yaitu ROA, LEV, ATO, dan SIZE untuk mengendalikan pengaruh variabel lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengambil judul **“ANALISIS MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PROBABILITAS TERJADINYA *EARNINGS RESTATEMENT*”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah proporsi komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya *earnings restatement*?
2. Apakah independensi komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya *earnings restatement*?
3. Apakah tingkat kepemilikan *large shareholders* memiliki pengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya *earnings restatement*?
4. Apakah kepemilikan pemerintah dalam perusahaan BUMN *go public* non keuangan memiliki probabilitas yang lebih tinggi terhadap terjadinya *earnings restatement*?
5. Apakah audit independen yang dilakukan oleh KAP Big 4 memiliki probabilitas yang lebih rendah terhadap terjadinya *earnings restatement*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *corporate governance* terhadap probabilitas terjadinya *earnings restatement* yang diindikasikan sebagai bentuk kegagalan pelaporan keuangan pada perusahaan *go public* non keuangan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan referensi guna memperkuat *corporate governance* dan meningkatkan kualitas dari informasi keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dari sifat kontekstual atas pengaruh keduanya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 3 kelompok, yaitu:

1. Bagi Investor,

Penelitian ini memberikan gambaran kepada investor tentang peran *corporate governance* dalam meningkatkan keandalan dari proses pelaporan keuangan dan kandungan informasi laba akuntansi. Dengan mereview *corporate governance* suatu perusahaan, investor akan lebih berhati-hati terhadap kapasitas manajemen dalam memanipulasi laba. Hal ini bisa membantu investor dalam mengevaluasi kualitas informasi dan keandalan laba akuntansi. Hasil dari penelitian ini akan membuka pintu baru untuk investor untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan mereka.

2. Bagi Regulator,

Setiap langkah untuk menyelaraskan praktik *corporate governance* membutuhkan bukti bahwa sistem *corporate governance* berjalan secara efektif atau tidak. Studi ini memberikan bukti peran *corporate governance* dalam meningkatkan keandalan nilai informasi yang relevan (yaitu laba akuntansi).

Bukti empiris yang mendukung pentingnya peran *corporate governance* akan menyediakan regulator justifikasi yang cukup untuk memaksakan penerapan yang bersifat *mandatory* dan sanksi yang tegas berkenaan dengan adanya beberapa perusahaan *go public* yang belum menerapkan *corporate governance* secara penuh.

3. Bagi Akademisi,

Akademisi akan memiliki pemahaman *corporate governance* yang lebih jelas tentang peran *corporate governance* di pasar modal untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan perusahaan *go public*. Model ini juga akan membantu diskusi kelas tentang peran tata kelola perusahaan dan analisis studi kasus.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian dan variabel-variabel terkait, yang nantinya akan dikembangkan sebagai dasar kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB II METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metodologi dan metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang mencakup variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penjelasan mengenai populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini membahas deskripsi objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variable independen, variabel dependen, variabel kontrol, analisis data, dan interpretasi terhadap hasil analisis berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami konsep *corporate governance*. Teori keagenan berpandangan bahwa manajer sebagai agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan para pemegang saham sebagai prinsipal. Mereka memiliki insentif untuk mengambil alih aset perusahaan, misalnya, melakukan proyek-proyek yang menguntungkan diri mereka sendiri dengan mengorbankan kekayaan para pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976; Fama dan Jensen, 1983; Shleifer dan Vishny, 1997). Zhuang *et al.* (2000) menyatakan bahwa konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan bukan saja antara pemegang saham dengan manajer tetapi juga antara pemegang saham yang mengendalikan manajemen dan pemegang saham dalam jumlah kecil yang tidak bisa secara efektif mengendalikan manajemen.

Scott dalam Ujijanto (n.d) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Kontrak kerja yang dimaksud adalah kontrak kerja antara pemilik modal dengan manajer

perusahaan. Dimana antara agen dan prinsipal ingin memaksimalkan utilitas masing-masing dengan informasi yang dimiliki.

Tetapi di satu sisi, agen memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibandingkan dengan prinsipal. Hal ini tentunya akan menimbulkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal mengenai informasi-informasi berkaitan dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer, dapat memicu mereka untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan utilitasnya. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini investor, akan menjadi sulit untuk mengontrol mereka secara efektif karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu, terkadang muncul kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor.

2.1.2. Asimetri Informasi

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan

dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (diluar manajemen). Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Irfan, 2002). Para pengguna internal (para manajemen) memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal.

Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*).

Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara prinsipal dan agen untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Eisenhardt dalam Ujianto dan Pramuka (2007) mengemukakan 3 asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk adverse*). Asumsi sifat dasar manusia tersebut bisa menyebabkan informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan.

2.1.3. Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan hasil dari beberapa tingkat fleksibilitas dan kebijakan manajer dalam melaporkan kinerja keuangan mereka. Manajer dapat menggunakan kebijakan ini baik untuk mengelola laba (Christie dan Zimmerman, 1994) atau mengkomunikasikan informasi pribadi mereka dan memiliki nilai yang relevan tentang kinerja masa depan perusahaan (Jones, 1991; Healy dan Palepu, 1993). Namun demikian, banyak penelitian yang menemukan bahwa manajemen laba dilakukan dengan tujuan untuk menyesatkan laporan keuangan atau bias hasil kontrak yang bergantung pada laba akuntansi (misalnya Payne dan Robb, 2000; Burgstahler dan Eames, 2003).

Menurut Rahmawati dkk. (n.d.) setidaknya ada 3 bentuk manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen, yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi,

Cara manajemen mempengaruhi laba yaitu melalui *judgement* terhadap estimasi akuntansi, contohnya estimasi tingkat piutang tidak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud, dan estimasi biaya garansi.

2. Mengubah metode akuntansi,

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, seperti merubah metode depresiasi aset tetap, dari metode depresiasi saldo menurun berganda ke metode garis lurus.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan,

Beberapa orang menyebut rekayasa jenis ini sebagai manipulasi keputusan operasional (Fischer dan Rosenzweig; Bruns dan Merchant dalam Rahmawati dkk., n.d.). Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan adalah mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian sampai periode akuntansi berikutnya (Daley dan Vigeland dalam Rahmawati dkk., n.d.), mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya, kerja sama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba, mengatur saat penjualan aset tetap yang sudah tidak dipakai (Bartov *et al.*; Black *et al.* dalam Rahmawati dkk., n.d.). Perusahaan yang mencatat persediaan menggunakan asumsi LIFO, juga dapat merekayasa peningkatan laba melalui pengaturan saldo persediaan (Frankel dan Trezervant dalam Rahmawati dkk., n.d.).

2.1.4. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia Mengenai Penyajian Kembali Laporan Keuangan (*Financial Restatements*)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25, Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi (IAI, 2009) paragraf 34 menjelaskan bahwa penyajian kembali laporan keuangan terjadi hanya jika koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan diterapkan secara retrospektif, yaitu

disajikan seolah-olah kesalahan yang mendasar telah dikoreksi dalam periode di mana kesalahan tersebut dibuat. Oleh karena itu, informasi komparatif dinyatakan kembali untuk mencerminkan jumlah unsur-unsur tersebut. Jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan periode-periode sebelum laporan keuangan tersebut, disesuaikan pada saldo awal periode (*retained earnings*) dari periode yang paling awal.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan penerapan retrospektif, mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25, Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi (IAI, 2009) adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan Mendasar,

Paragraf 30 menjelaskan bahwa kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau lebih periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Koreksi atas kesalahan tersebut biasanya dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

Paragraf 33 mensyaratkan bahwa dalam mengoreksi suatu kesalahan yang mendasar, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan saldo laba awal periode.

2. Penerapan Suatu Standar Akuntansi Keuangan,

Paragraf 37 menjelaskan bahwa pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan suatu perusahaan selama beberapa periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Paragraf 38 mengungkapkan bahwa suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Sedangkan mengenai bagaimana perlakuan akuntansinya, paragraf 41 menyatakan bahwa suatu perubahan kebijakan akuntansi dapat diterapkan secara retrospektif ataupun prospektif.

Paragraf 42 mengatur bahwa suatu perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan sehubungan dengan penerapan suatu standar akuntansi keuangan yang diberlakukan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan transisi yang ditentukan dalam PSAK tersebut. Jika tidak ada ketentuan transisi dan untuk semua perubahan kebijakan akuntansi yang lain, perubahan kebijakan akuntansi tersebut harus diterapkan sesuai dengan perlakuan akuntansi dalam paragraf 45, 48, dan 49 dari pernyataan ini.

Paragraf 43 menjelaskan bahwa ketentuan transisi dalam standar akuntansi keuangan dapat mensyaratkan apakah perubahan kebijakan akuntansi yang terjadi harus diterapkan secara retrospektif atau prospektif.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi Lain,

Paragraf 45 mengatur bahwa suatu perubahan kebijakan akuntansi harus diterapkan secara retrospektif dengan melaporkan jumlah setiap penyesuaian yang terjadi yang berhubungan dengan periode sebelumnya sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode (*retained earnings*), kecuali jika jumlah tersebut tidak dapat ditentukan secara wajar. Informasi komparatif harus dinyatakan kembali, kecuali jika untuk melaksanakannya dianggap tidak praktis.

Paragraf 48 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus diterapkan secara prospektif jika jumlah penyesuaian terhadap saldo laba awal periode (*retained earnings*) yang dijelaskan dalam paragraf 45 tidak dapat ditentukan secara wajar.

Paragraf 49 menjelaskan bahwa jika suatu perubahan akuntansi mempunyai pengaruh material terhadap periode sekarang atau sebelumnya, atau mungkin juga mempunyai pengaruh material terhadap periode berikutnya, perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Alasan dilakukannya perubahan.
- b. Jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan periode sebelumnya.

- c. Jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif.
- d. Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali informasi komparatif dianggap tidak praktis.

2.1.5. Asimetri Informasi dan *Earnings Restatement* Sebagai Masalah Agensi

Schift dan Lewin dalam Hartono dan Riyanto dalam Ujianto (n.d.) menyatakan bahwa agen berada posisi yang mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan prinsipal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan asimetri informasi yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal. Sehingga dalam kondisi semacam ini prinsipal seringkali pada posisi yang tidak diuntungkan.

Dalam penyajian informasi akuntansi, khususnya penyusunan laporan keuangan, agen juga memiliki informasi yang asimetri sehingga dapat lebih fleksibel mempengaruhi pelaporan keuangan untuk memaksimalkan kepentingannya. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI dalam Ujianto, n.d.). Namun karena

adanya kondisi yang asimetri, dapat menyebabkan agen untuk mempengaruhi angka-angka akuntansi.

Tindakan *restatements*, terutama *earnings restatement*, adalah contoh tindakan agresif manajemen laba dengan memanfaatkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal. US General Accounting Office atau GAO (2002) menilai bahwa *financial restatements* adalah indikator yang paling mudah untuk diobservasi dan merupakan sumber investigasi baru yang digambarkan melalui salah saji akuntansi. Agrawal dan Chadha (2005) menyatakan bahwa apabila intensitas *earnings restatement* yang terjadi terus meningkat, dapat menimbulkan kekhawatiran investor terhadap keandalan laba itu sendiri. Zhingzhong *et al.* (2011) menyatakan bahwa lemahnya pengawasan internal perusahaan adalah penyebab utama atas meluasnya kegagalan pelaporan keuangan ini.

Meskipun *financial restatements* dimaksudkan untuk memberikan informasi keuangan yang lebih akurat dengan harapan yang lebih baik untuk melindungi kepentingan investor, manajemen juga dapat melancarkan tindakan untuk menguntungkan dirinya sendiri. *Financial restatements* dipandang sebagai cermin kredibilitas perusahaan yang buruk dan rendahnya kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Anderson dan Yohn, 2002). Selain itu, kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diragukan kualitasnya ketika perusahaan itu melakukan *earnings restatement* (Richardson *et al.*, 2002; Akhigbe *et al.*, 2005). Apabila kejadian seperti ini terus berulang dan meningkat, tentunya dapat menimbulkan efek negatif bagi perusahaan-perusahaan lainnya, seperti

membangkitkan kecurigaan publik kepada akuntan dan menurunkan kepercayaan investor di pasar modal (Wu, 2003).

2.1.6. Mekanisme Untuk Mengurangi Masalah Agensi

Untuk mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan investor luar, Jensen dan Meckling (1976) mengidentifikasi ada dua cara yang dapat digunakan, yaitu investor luar turut melakukan pengawasan (*monitoring*) dan manajer sendiri melakukan pembatasan-pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*). Pada satu sisi, kedua kegiatan tersebut akan mengurangi kesempatan penyimpangan oleh manajer sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Sedangkan pada sisi yang lain keduanya akan memunculkan biaya sehingga akan mengurangi nilai perusahaan. Calon investor akan mengantisipasi adanya kedua biaya tersebut, ditambah dengan kerugian yang masih muncul meskipun sudah ada *monitoring* dan *bonding* yang disebut dengan *residual cost*. Antisipasi atas ketiga biaya yang didefinisikan sebagai biaya agensi ini nampak pada harga saham yang terdiskon pada saat perusahaan menjual sahamnya.

Mekanisme *corporate governance* adalah cara efektif yang dapat digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku oportunistik manajemen. Dechow *et al.* (1996) mengungkapkan bahwa laba akuntansi menjadi lebih handal dan informatif ketika perilaku oportunistik manajemen dikendalikan menggunakan sistem pengawasan yang baik. Peasnell *et al.* (2000a), Klein (2002b), dan Zhingzhong *et al.* (2011) menunjukkan bahwa sistem pengawasan

melalui mekanisme *corporate governance* mampu mengurangi kapasitas manajemen untuk mengelola laba. Selain itu, *corporate governance* juga membantu investor dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham dan meningkatkan keandalan keuangan informasi dan integritas yang dari proses pelaporan keuangan (Watt dan Zimmerman, 1986).

2.2. *Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Good Corporate Governance (selanjutnya disebut GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (KNKG dalam Taman dan Nugroho, 2011). Oleh karena itu, diterapkannya GCG bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Pengertian lain *corporate governance* menurut Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN (Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi untuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi untuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN))

untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan *stakeholders* yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham (Bapepam-LK, 2006).

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/modal yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan kinerja manajemen serta menjamin terciptanya akuntabilitas manajemen terhadap prinsipal berdasarkan peraturan yang ada.

2.2.1. Prinsip *Corporate Governance*

Menurut Organization for Economic Corporation and Development atau OECD dalam Arifin (2005), prinsip-prinsip dasar GCG adalah kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh GCG telah diterapkan dalam perusahaan. Keempat prinsip tersebut secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewajaran (*Fairness*),

Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (*fraud*) dan praktik-praktik *insider trading* yang dilakukan oleh agen/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*).

2. Akuntabilitas (*Accountability*),

Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan

direksi independen, dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.

3. Transparansi (*Transparency*),

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama.

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi, termasuk juga mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka (Tjager *et al.* dalam Arifin, 2005). Dengan kata lain, prinsip transparansi ini

menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian (*disclosure*) informasi yang dimiliki perusahaan.

4. *Responsibilitas (Responsibility)*,

Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan GCG, yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan pihak-pihak lainnya.

2.2.2. Komposisi Dewan

2.2.2.1. Komisaris Independen

Dewan komisaris adalah suatu badan dalam perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris yang independen dan berasal dari luar perusahaan, yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Susiana dan Herawaty, 2007). Bursa Efek Jakarta (BEJ) dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 mewajibkan bahwa setiap emiten atau perusahaan publik setidaknya memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris.

Secara teori dan praktik fungsi organ perseroan, fungsi dewan komisaris adalah melakukan fungsi pengawasan dengan segala kemampuan terbaiknya hanya untuk kepentingan perseroan. Tujuan adanya komisaris independen adalah sebagai penyeimbang pengambilan keputusan dewan komisaris. Sedangkan misi komisaris independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih obyektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholders* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Sehingga ada tolok ukur penilaian dewan komisaris (*board of director*). Dalam konstruksi hukum perseroan terbatas, kinerja perseroan adalah indikator utama performa *board of director*. Sebagai upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, maka komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi.

Penunjukan komisaris independen adalah langkah-langkah reformasi kunci yang secara signifikan dapat meningkatkan kemandirian dewan dan membuat mereka lebih efektif dalam mengejar kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, bukan hanya kepentingan pemegang saham dominan. Komisaris independen secara umum didefinisikan sebagai direktur yang bukan merupakan karyawan perusahaan, relatif bukan pemegang saham dominan atau manajer puncak, dan tidak memiliki kepentingan bisnis yang serius di perusahaan. Ketika kondisi ini terpenuhi, seorang direktur dapat bertindak lebih independen terhadap manajemen (Sang-Woo Nam dan Il Chong Nam, 2004).

Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer atau dengan kata lain, semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan (Chtourou *et al.*, 2001).

2.2.2.2. Komite Audit

Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, dan komite kebijakan *corporate governance* (KNKG, 2006). Menurut peraturan Bapepam-LK Nomor: KEP-339/BEJ/2001 tercatat hanya komite audit yang wajib dimiliki oleh perusahaan *go public* di Indonesia.

Keberadaan komite audit di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bapepam-LK Nomor: SE-03/PM/2002 bagi emiten atau perusahaan publik dan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-103/MBU/2002 bagi perusahaan BUMN. Keduanya menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Fungsi komite audit sendiri dijelaskan pada halaman berikutnya berdasarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (KNKG, 2006).

1. Membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas.

Dalam rekomendasi yang dibentuk oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI dalam Anggraini, 2010) adalah penting bahwa perusahaan harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya. Hal ini disebabkan karakteristik komite akan berpengaruh pada peran komite audit dalam pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan manajemen.

Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak eksternal perusahaan yang independen, terdiri dari individu-individu yang independen, tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen sebagai pengelola perusahaan, dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Alasan utama independensi begitu penting adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit. Individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI dalam Anggraini, 2010).

Keberadaan komite audit yang independen diharapkan bisa berdampak pada persepsi pemegang saham terhadap keandalan pendapatan dan relevansi setelah pengkondisian terhadap manajemen laba. Sehingga pemantauan yang dilakukan oleh komite audit dapat meningkatkan integritas proses pelaporan keuangan dan memberikan jaminan kepada pemegang saham terhadap keandalan laba yang dilaporkan.

2.2.3. Konsentrasi Kepemilikan

Kepemilikan terpusat merupakan suatu aspek yang penting dalam *corporate governance* dan faktor yang diyakini dapat mengatasi masalah keagenan. Kepemilikan terpusat merupakan suatu kondisi dimana sejumlah kecil pemilik memiliki porsi kepentingan yang besar dalam perusahaan (Violita dalam Ferima dalam Mada, 2013). Pemegang saham dengan proporsi kepemilikan yang besar (*large shareholders*) dapat mengontrol perusahaan dengan lebih mudah karena ia memiliki kekuatan untuk membatasi tindakan manajemen yang kurang efektif.

Kepemilikan tersebar membutuhkan biaya lebih untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan manajer. Dalam kepemilikan terpusat, *large shareholders* berbeda dari pemegang saham kecil karena mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berperan aktif dalam memantau dan mendisiplinkan manajemen. Berle dan Means (1932) menyatakan bahwa sulit bagi pemilik untuk mengontrol manajemen karena perusahaan publik cenderung dimiliki sebagian besar oleh pemegang saham kecil.

Grossman dan Hart (1980) menyatakan bahwa masalah mendasar yang dimiliki oleh pemegang saham kecil adalah tidak ada pemegang saham yang memiliki insentif cukup besar untuk mengambil tindakan guna memastikan bahwa manajemen bertindak dalam kepentingan terbaik mereka. Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa keberadaan *large shareholders* dapat mengurangi masalah agensi karena mereka memiliki kepemilikan yang besar dapat memberikan insentif keuangan yang cukup untuk mengeluarkan biaya monitoring.

Brickley *et al.* (1988) menyatakan bahwa efektivitas *large shareholders* sebagai pemantau dipengaruhi oleh jenis investor. Ditemukan bahwa beberapa jenis *large shareholders* lebih bersedia untuk menantang manajemen dan memiliki kekuatan untuk memonitor manajemen yang membuat lebih sulit bagi manajemen untuk memanipulasi akrual. Cheng dan Reitenga (2001) menemukan bukti bahwa pemegang saham institusional non-aktif lebih tertarik pada kinerja jangka pendek perusahaan karena mereka relatif memiliki jumlah saham yang kecil. Inilah yang kemudian menciptakan tekanan untuk meningkatkan laba agar nilai perusahaan meningkat. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa pemegang saham institusional aktif lebih tertarik pada kinerja jangka panjang dan memiliki kekuatan yang lebih baik untuk memonitor manajemen.

2.2.4. Auditor Independen

Akuntan adalah salah satu profesi yang terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Keterlibatan akuntan mencakup dua pihak, yaitu internal dan eksternal. Keterlibatan internal terjadi bila akuntan menjadi salah satu bagian dari

manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Selaku akuntan manajemen, akuntan adalah bagian dari manajemen perusahaan sehingga dia terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas perusahaan. Menurut perspektif teori keagenan, dalam hal ini akuntan adalah bagian dari agen sehingga perilaku akuntan boleh dikatakan sama dengan perilaku agen (Arifin, 2005).

Keterlibatan eksternal akuntan adalah bila akuntan menjalankan profesinya sebagai auditor yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan. Profesi auditor dari para akuntan memainkan peran yang penting. Merekalah yang selama ini bertugas memverifikasi kewajaran informasi yang mendasari dilakukannya berbagai macam transaksi bisnis pemakai laporan keuangan. Tanpa kepercayaan terhadap kebenaran kondisi keuangan suatu perusahaan, para investor akan ragu untuk membeli saham suatu perusahaan terbuka dan pasar akan sulit tercipta (Tjager *et al.* dalam Arifin, 2005).

Arifin (2005) menyatakan bahwa keterlibatan akuntan dalam berbagai aktivitas penerapan prinsip GCG adalah penting. Pemaparan dibawah ini menjelaskan bagaimana peran akuntan dalam penerapan prinsip GCG:

1. Prinsip Kewajaran (*Fairness*),

Laporan keuangan dikatakan wajar bila laporan keuangan tersebut memperoleh opini atau pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dari akuntan publik. Laporan keuangan yang wajar berarti laporan

keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material, disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

Peran auditor independen (akuntan publik) dalam hal ini adalah memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan, dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan. Adanya kewajaran laporan keuangan dapat mempengaruhi investor untuk membeli atau menarik sahamnya pada sebuah perusahaan. Jelaslah bahwa kegunaan informasi akuntansi dalam laporan keuangan akan dipengaruhi oleh adanya kewajaran penyajian. Kewajaran penyajian hanya bisa dipenuhi, jika data yang ada didukung oleh adanya bukti-bukti yang sah dan benar serta penyajiannya tidak ditujukan hanya untuk sekelompok orang-orang tertentu.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*),

Adalah bentuk tanggungjawab manajemen melalui pengawasan yang efektif dengan membentuk komite audit. Bapepam-LK mensyaratkan bahwa anggota komite audit minimum sebanyak tiga orang dan salah satu anggotanya haruslah seorang akuntan. Komite audit mempunyai tugas utama untuk melindungi kepentingan pemegang saham ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan melakukan tinjauan atas reliabilitas dan integritas informasi dalam laporan keuangan dan laporan operasional lain beserta kriteria untuk mengukur, melakukan klasifikasi, dan penyajian dari

laporan tersebut. Untuk alasan itulah profesi akuntan sangat diperlukan dan mempunyai peranan yang penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah keagenan yang timbul antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Dengan adanya independensi dari komite audit tersebut, diharapkan dapat mempengaruhi investor dalam melakukan pilihannya untuk membeli atau melepas suatu saham yang bisa dilihat dari adanya *abnormal return* (Steven J. Carlson *et al.* dalam Arifin, 2005).

3. Prinsip Transparansi (*Transparency*),

Prinsip transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas penyajian informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu, akuntan manajemen (yang bekerja pada perusahaan) dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Untuk itu informasi yang ada dalam perusahaan harus diukur, dicatat, dan dilaporkan oleh akuntan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku.

Prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan, terutama menyangkut pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian yang lengkap (*disclosure*) atas semua informasi yang dimiliki perusahaan. Peran akuntan manajemen, internal auditor, dan komite audit menjadi penting terutama dalam hal penyajian informasi akuntansi

dalam laporan keuangan perusahaan secara transparan kepada pemakainya. Ini sesuai dengan salah satu aturan Bapepam-LK yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan *go public* harus mengandung unsur keterbukaan (tranparansi), dengan mengungkapkan kejadian ekonomis yang bermanfaat kepada pemakainya.

Praktik yang dikembangkan dalam rangka transparansi diantaranya perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang berkait dengan perusahaan, risiko yang dihadapi, dan rencana/kebijakan perusahaan (*corporate action*) yang akan dijalankan. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk menyampaikan kepada semua pihak tentang struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan-perubahan yang terjadi.

4. Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*),

Prinsip ini berhubungan dengan tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat, yaitu dengan cara mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya. Prinsip ini berkaitan juga dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Seiring dengan perubahan sosial masyarakat yang menuntut adanya tanggungjawab sosial perusahaan, profesi akuntan juga mengalami perubahan peran. Pandangan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya saat ini tidak hanya memfokuskan pada perolehan laba perusahaan, tetapi juga memperhatikan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selain itu,

kelangsungan hidup perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham tetapi juga oleh *stakeholder* yang lain (misalnya masyarakat dan pemerintah).

Kasus PT. Inti Indorayon di Sumatera Utara yang ditutup karena dianggap bermasalah dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, adalah contoh suatu perusahaan yang melalaikan tanggungjawab sosialnya dengan tidak mencantumkan aktivitas pengelolaan lingkungan sosial dalam laporan tahunannya. Pelaporan informasi non-keuangan ini secara umum telah terakomodasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, Penyajian Laporan Keuangan. Dalam PSAK ini dinyatakan bahwa perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting.

Peran akuntan untuk menegakkan prinsip ini semakin berkembang dengan adanya Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Bapepam-LK, BEJ, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dan Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) pada bulan Juni 2005. Tujuan ISRA adalah memberikan *award* kepada perusahaan yang telah menerapkan dan membuat Sustainability Reporting (SR) dengan baik guna mendorong perusahaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. SR adalah pengungkapan (*disclosure*) tentang kegiatan perusahaan yang menyangkut aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang merupakan tanggungjawab sosial perusahaan (Satyo dalam Arifin, 2005).

Dalam prosesnya, peran akuntan manajemen sangat besar. Akuntan yang menjadi *top management* dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong penyajian *sustainability reporting*. Sedangkan akuntan yang berada pada *middle management* dapat berperan dalam penilaian, pengukuran aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan, serta berbagai dampak yang dipengaruhinya.

2.3. Variabel Kontrol

2.3.1. Return on Assets (ROA)

Return on Assets (selanjutnya disebut ROA) adalah rasio profitabilitas yang mengukur jumlah profit yang diperoleh tiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan. ROA memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan efisiensi penggunaan jumlah aset untuk operasional perusahaan.

ROA memberikan gambaran kepada investor tentang bagaimana perusahaan mengkonversikan uang yang telah diinvestasikan dalam laba bersih. Disamping itu, ROA juga digunakan sebagai indikator dari profitabilitas dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. ROA dihitung dengan membagi laba bersih (*net income*) dengan rata-rata jumlah aset perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka perusahaan tersebut semakin efisien dalam menggunakan asetnya. Hal ini berarti perusahaan tersebut dapat menghasilkan uang (*earnings*) yang lebih banyak dengan investasi yang sedikit. Sehingga berdampak pada meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan investor (Suad Husnan dalam Ariyanti, 2010).

2.3.2. Leverage (LEV)

Leverage dapat didefinisikan sebagai penggunaan aset atau dana. Dalam penggunaannya, perusahaan harus menutupnya dengan biaya tetap atau dengan membayar beban tetap. Terdapat 2 macam *leverage*, yaitu *operating leverage* dan *financial leverage*. Ramadhan (2011) menyatakan bahwa *operating leverage* merupakan penggunaan aset dengan biaya tetap dengan harapan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh penggunaan aset itu akan cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. *Financial leverage* menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan proporsi penggunaan hutang. Dengan demikian, semakin besar proporsi hutang yang digunakan oleh perusahaan, pemilik modal akan menanggung risiko yang semakin besar juga. Penggunaan hutang itu sendiri bagi perusahaan mencakup 3 dimensi, yaitu:

1. Pemberi kredit akan menitikberatkan pada besarnya jaminan yang diberikan.
2. Dengan menggunakan hutang, apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya, maka pemilik perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih.
3. Dengan menggunakan hutang, maka pemilik memperoleh dana dan tidak kehilangan pengendalian perusahaan.

Leverage merupakan salah satu faktor penentu internal perusahaan yang termasuk dalam kategori risiko institusi. Besarnya *leverage* perusahaan akan menyebabkan perusahaan meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja. Dengan kinerja yang maksimal, diharapkan

kreditur tetap memiliki kepercayaan terhadap perusahaan yang diimplementasikan dengan kemudahan pada saat proses pengucuran dana serta dalam proses pembayaran (Cohen dalam Ramadhan, 2011).

2.3.3. Asset Turnover Ratio (ATO)

Efisiensi produktivitas dalam penelitian ini diukur dengan Asset Turnover Ratio (selanjutnya disebut ATO). Rasio ini merupakan salah satu ukuran dari efisiensi produktivitas. ATO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aset yang dimiliki. Jika nilai ATO diatas satu kali menandakan perusahaan telah mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada penggunaan aset yang dimiliki (Tarigan, 2011).

Efisiensi produktivitas mencerminkan seberapa besar efisiensi input yang dikonversi menjadi *output* (Ghosh dan Mondal dalam Tarigan, 2011). Kinerja keuangan perusahaan sangat tergantung pada keberhasilan atau kegagalan mengolah aset menjadi pendapatan. Apabila aset dapat dimanfaatkan dengan efisien maka fungsi dan peran perusahaan tersebut dapat dicapai.

2.3.4. Firm Size (SIZE)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan dengan berbagai cara yaitu jumlah aset, penjualan, tenaga kerja, dan sebagainya. Menurut Brigham dan Houston dalam dalam Fajri (2013) ukuran perusahaan merupakan rata-rata jumlah penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun.

Perusahaan yang besar akan memiliki kestabilan dan operasi yang dapat diprediksi lebih baik, sehingga kesalahan estimasi yang ditimbulkan akan menjadi lebih kecil. Selain itu, perusahaan besar akan memiliki kemampuan diversifikasi yang lebih baik, mempunyai efek variasi portofolio antar divisi-divisi, dan aktivitas bisnisnya sehingga dapat mengurangi efek relatif kesalahan estimasi. Meskipun demikian, perusahaan besar lebih banyak menghadapi sensitivitas politik yang tinggi dan menghadapi kos politikal yang lebih tinggi dari pada perusahaan kecil (Gul *et al.*, 2002). Perusahaan yang besar akan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan karena perusahaan yang besar memiliki aset dan memperoleh laba yang besar pula. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan, jumlah aset yang dimiliki, dan jumlah penjualan yang diperoleh, serta kapitalisasi pasarnya dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa studi empiris telah dilakukan untuk mengkaji bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap probabilitas terjadinya *financial restatements* yang dianggap sebagai kegagalan pelaporan keuangan. Tetapi sejauh ini tidak ada hasil yang konsisten (lihat Tabel 2.1.). Penerapan *corporate governance* bagi perusahaan *go public* yang bersifat *mandatory* diharapkan mampu memberikan andil yang besar untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan emiten dan perusahaan publik.

Beasley (1996), Dechow *et al.* (1996), dan Farber (2005) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara tingkat kemandirian dewan dan kemungkinan terjadinya *restatements*. Peng dan Yang (2006) dan Zhingzhong *et al.* (2011) memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Beasley (1996), Dechow *et al.* (1996), dan Farber (2005). Artinya, semakin tinggi kemandirian dewan, kemungkinan terjadinya *restatements* menjadi lebih rendah. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Abbott *et al.* (2003) dan Yang dan Yang (2006) menemukan hal yang berbeda. Ukuran dewan, independensi anggota dewan, dualitas CEO, dan tingkat kepemilikan *outside large shareholders* ditemukan tidak signifikan atas kemungkinan terjadinya *restatements*. Agrawal dan Chadha (2005) menyatakan bahwa hanya dewan independen dengan kemampuan akuntansi yang baik memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *restatements*.

Dechow *et al.* (1996), Farber (2005), Peng dan Yang (2006), Yang dan Yang (2006), dan Zhingzhong *et al.* (2011) menyatakan bahwa keberadaan komite audit memiliki korelasi langsung terhadap kemungkinan terjadinya *restatements*. Sesuai dengan teori keagenan, keterlibatan pihak ketiga diluar perusahaan mampu membantu masalah agensi yang terjadi antara prinsipal dan agen. Akan tetapi, Agrawal dan Chadha (2005) menemukan hasil yang berbeda. Ditemukan bahwa keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh dengan kemungkinan terjadinya *restatements*. Selain itu, Agrawal dan Chadha (2005) juga menemukan adanya relevansi ketidakandalan laba yang dilaporkan seiring dengan meningkatnya *earnings restatement*.

Abdullah *et al.* (2010) menemukan alasan utama salah saji dalam laporan keuangan adalah untuk memanipulasi laba. Secara mengejutkan, komite audit yang independen ditemukan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *restatements*. Artinya, komite audit yang independen memiliki andil terhadap kemungkinan terjadinya *restatements* yang lebih tinggi meskipun bukan merupakan faktor utama. Selain itu, kepemilikan *outside shareholders* dalam jumlah yang besar memiliki korelasi langsung terhadap kemungkinan terjadinya *restatements*. Akan tetapi, Abbott *et al.* (2003) dan Agrawal dan Chadha (2005) justru menemukan hasil yang berbeda. Ditemukan bahwa kepemilikan *outside large shareholders* tidak memiliki korelasi langsung terhadap kemungkinan terjadinya *restatements*.

Farber (2005), Abdullah *et al.* (2010), dan Zhingzhong *et al.* (2011) menemukan bahwa perusahaan *go public* yang diaudit oleh KAP Big 4 ternyata memiliki probabilitas yang lebih rendah terhadap terjadinya *restatements*. Namun hasil yang berbeda diperoleh Dechow *et al.* (1996) dan Agrawal dan Chadha (2005). Ditemukan bahwa kemungkinan terjadinya *restatements* tidak memiliki korelasi dengan audit independen yang dilakukan oleh KAP, sekalipun proses audit dilakukan oleh KAP Big 4.

Studi empiris untuk mengkaji bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap probabilitas terjadinya *financial restatements* menjadi semakin menarik, ketika Zhingzhong *et al.* (2011) menyertakan kepemilikan pemerintah dalam perusahaan *go public* di Cina. Ditemukan bahwa kepemilikan pemerintah dalam perusahaan BUMN *go public* memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap

kemungkinan terjadinya *restatements* yang lebih tinggi. Fama (1980) menyatakan bahwa sebagai agen dalam kepemilikan pemerintah, direksi yang mengelola berbagai perusahaan juga berfungsi sebagai pejabat di berbagai tingkat pemerintahan sehingga mereka tidak memiliki motivasi yang memadai untuk secara efektif memonitor dan mengevaluasi manajemen.

Zhingzhong *et al.* (2011) menyatakan bahwa peran mereka sebagai manajer puncak perusahaan dan juga seorang politisi, mereka tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi, tetapi juga promosi politik. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk bergaul dengan pejabat pemerintah dari tingkat yang lebih tinggi sehingga mereka kurang memperhatikan operasional perusahaan. Karena kinerja perusahaan juga merupakan salah satu kriteria penilaian mereka untuk promosi, tidak mengherankan ketika masa jabatan berakhir, mereka memiliki motivasi yang kuat untuk melebih-lebihkan laba.

Kepemilikan pemerintah yang besar dalam perusahaan BUMN *go public* (diatas 51%) menjadikan mereka sebagai *large shareholders* dalam perusahaan memang menjadi polemik tersendiri. Peran mereka yang diharapkan lebih efektif dalam memonitor dan mengevaluasi manajemen, justru diperoleh hasil yang sebaliknya. Zhingzhong *et al.* (2011) menyatakan bahwa tingkat kepemilikan *large shareholders* (selain kepemilikan pemerintah) memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *restatements* yang lebih rendah. Artinya, dengan kepemilikan mereka yang besar, mereka memiliki insentif yang cukup dan memadai untuk memantau dan mengevaluasi manajemen.

Tabel 2.1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Beasley <i>et al.</i> (1996)	An Empirical Analysis of The Relation Between Board of Director Composition and Financial Statement Fraud.	Variabel Independen: Dewan independen, komite audit, dualitas CEO, dan <i>outside large shareholders</i> . Variabel Dependen: Accounting and Auditing Enforcement Release (AAER).	Dewan independen ditemukan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemungkinan terjadinya <i>restatements</i> . Sedangkan variabel lainnya tidak ditemukan berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya <i>restatements</i> .
2.	Dechow <i>et al.</i> (1996)	Causes and Consequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Action by The SEC.	Variabel Independen: Dewan independen, komite audit, dualitas CEO, <i>outside large shareholders</i> , dan <i>audit firm</i> . Variabel Dependen: Accounting and Auditing Enforcement Release (AAER).	Dewan independen, komite audit, dan <i>outside shareholders</i> ditemukan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemungkinan terjadinya <i>restatements</i> . Dualitas CEO justru ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kegagalan pelaporan ini. Sedangkan variabel lainnya tidak ditemukan berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya <i>restatements</i> .

3.	Abbott <i>et al.</i> (2003)	Audit Committee Characteristics and Restatements.	<p>Variabel Independen: Ukuran dewan, dewan independen, dualitas CEO, dan <i>outside large shareholders</i>.</p> <p>Variabel Dependen: <i>Financial restatements</i>.</p>	Ditemukan hanya ukuran dewan yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemungkinan terjadinya <i>restatements</i> . Sedangkan variabel lainnya tidak ditemukan berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya <i>restatements</i> .
4.	Agrawal and Chadha (2005)	Corporate Governance and Accounting Scandals.	<p>Variabel Independen: Ukuran dewan, dewan independen dengan kemampuan akuntansi, dualitas CEO, <i>outside large shareholders</i>, dan <i>audit firm</i>.</p> <p>Variabel Dependen: <i>Financial restatements</i>.</p>	Ditemukan hanya dewan independen dengan kemampuan akuntansi mumpuni yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap probabilitas terjadinya <i>restatements</i> . Sedangkan variabel lainnya tidak ditemukan berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya <i>restatements</i> .
5.	Farber (2005)	Restoring Trust After Fraud: Does Corporate Governance Matter?	<p>Variabel Independen: Dewan independen, komite audit, dualitas CEO, <i>outside large shareholders</i>, dan <i>audit firm</i>.</p>	Dewan independen, komite audit, <i>outside large shareholders</i> , dan audit independen yang dilakukan oleh KAP ditemukan memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Akan tetapi, dualitas CEO justru ditemukan

			Variabel Dependen: <i>Financial restatements.</i>	memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kegagalan pelaporan ini.
6.	Peng dan Yang (2006)	The Research on The Implement Effect of Independent Directors and Auditing Committee - The Proof from Financial Restatements.	Variabel Independen: Ukuran dewan, dewan independen, komite audit, dan dualitas CEO. Variabel Dependen: <i>Earnings restatement.</i>	Komite audit ditemukan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemungkinan terjadinya <i>restatements</i> . Akan tetapi, dewan independen dan dualitas CEO justru ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kegagalan pelaporan ini.
7.	Yang dan Yang (2006)	The Research on The Implement Effect of Independent Directors and Auditing Committee - The Proof from Financial Restatements.	Variabel Independen: Dewan independen, komite audit, dan dualitas CEO. Variabel Dependen: <i>Financial restatements.</i>	Ditemukan hanya dualitas CEO yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemungkinan terjadinya <i>restatements</i> . Sedangkan variabel lainnya tidak ditemukan berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya <i>restatements</i> .
8.	Abdullah <i>et al.</i> (2010)	Financial Restatements and Corporate Governance Among Malaysian	Variabel Independen: Dewan independen, independensi komite nominasi, independensi	Komite audit yang independen dan tingkat kepemilikan <i>outside shareholders</i> ditemukan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap

		Listed Companies.	komite audit, dualitas CEO, kepemilikan manajerial, dan <i>outside blockholders</i> . Variabel Dependen: <i>Financial restatements</i> .	kemungkinan terjadinya <i>restatements</i> . Sedangkan variabel lainnya ditemukan pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemungkinan terjadinya <i>restatements</i> . Hanya dualitas CEO yang ditemukan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kegagalan pelaporan ini.
9.	Zhingzhong <i>et al.</i> (2011)	Does Corporate Governance Affect Restatements of Financial Reporting? Evidence from China.	Variabel Independen: <i>Large shareholders</i> , kepemilikan pemerintah, SOE, komite audit, dan audit independen. Variabel Dependen: <i>Earnings restatement</i> .	<i>Large shareholders</i> , proporsi dewan independen, komite audit, dan audit independen ditemukan memiliki pengaruh negatif dan signifikan masing-masing pada tingkat 10% terhadap kemungkinan terjadinya <i>restatements</i> . Sedangkan kepemilikan pemerintah ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kegagalan pelaporan ini pada tingkat 10%.

Sumber: Data sekunder (diolah 2013).

Penelitian ini adalah replikasi atas penelitian Zhingzhong *et al.* (2011) di Cina dan sampel yang digunakan adalah perusahaan *go public* non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Terdapat 5 perbedaan sebagai bentuk penyesuaian dan modifikasi akibat perbedaan kondisi pasar modal. Perbedaan pertama yaitu mengenai periode tahun buku yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan periode tahun buku yang lebih panjang, yaitu untuk periode tahun buku yang berakhir 2004 s/d 2010 guna memberikan gambaran terkini mengenai praktik *corporate governance* di Indonesia. Perbedaan kedua terletak pada konsentrasi kepemilikan, yaitu kepemilikan pemerintah. Terdapat 3 klasifikasi kepemilikan pemerintah di Cina, yaitu State Assets Administration Committee (SAAC), State Assets Administration Company (SAAC), dan kepemilikan langsung atas nama pemerintah. Sedangkan di Indonesia, kepemilikan pemerintah hanya dicerminkan atas nama Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Perbedaan ketiga, (masih dalam konsentrasi kepemilikan), yaitu mengenai jenis saham yang diperdagangkan. Pasar modal di Cina memperdagangkan 3 jenis saham, yaitu saham A, saham B, dan saham H. Perbedaan ketiganya selain tempat perdagangannya adalah jenis kepemilikan yang melekat. Saham A secara khusus diperdagangkan dalam mata uang Cina dan dikhususkan bagi investor dalam negeri. Saham B secara khusus diperdagangkan dalam mata uang asing bagi investor luar. Saham H secara bebas diperdagangkan bagi semua investor. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan saham A, B, dan H adalah pihak luar yang memiliki sejumlah saham dalam perusahaan, atau lebih dikenal dengan *outside shareholders*.

Peneliti beragumen bahwa kepemilikan *outside shareholders* akan dieliminasi dengan asumsi bahwa kepemilikan *large shareholders* memberikan gambaran yang lebih baik untuk mewakili kepemilikan saham oleh pihak diluar perusahaan. Cheng dan Reitenga (2001) menemukan bukti bahwa pemegang saham institusional aktif lebih tertarik pada kinerja jangka panjang dan memiliki kekuatan yang lebih baik untuk memonitor manajemen dibandingkan pemegang saham institusional non-aktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemegang saham institusional aktif berperan sebagai *large shareholders* dalam sebuah perusahaan sehingga mereka dapat melakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik terhadap manajemen.

Perbedaan keempat yaitu mengenai variabel komite audit. Zhingzhong *et al.* (2011) membahas isu mengenai keberadaan komite audit pada perusahaan *go public* di Cina. Sedangkan dalam penelitian ini, isu independensi diangkat sebagai prasyarat penting komite audit dalam menjalankan perannya. Hal ini disebabkan telah diterbitkannya peraturan Bapepam-LK melalui SE Bapepam-LK Nomor 03 tahun 2000, Keputusan Direksi BEJ Nomor 339 tahun 2001, dan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, yang menyatakan bahwa perusahaan *go public* wajib membentuk komite audit.

Selain itu, isu independensi dipilih karena faktor independensi merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh komite audit. Kolins *et al.* (1991) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin independen komite audit, semakin besar kemungkinan untuk dapat melakukan pengawasan pelaporan keuangan secara lebih efektif dan menjamin objektivitas. Independen berarti bebas dari

benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif (KNKG, 2006). Jika kualitas dan karakteristik komite audit tercapai, maka transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal.

Perbedaan kelima adalah batasan sampel perusahaan yang akan diujikan. Zhingzhong *et al.* (2011) membatasi *earnings restatement* hanya sebatas yang disebabkan oleh salah saji akuntansi. Jika mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25, Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi (IAI, 2009), maka salah saji akuntansi dapat didefinisikan sebagai kesalahan yang mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Penelitian ini memperluas batasan sampel yang digunakan dengan menyertakan perusahaan yang melakukan perubahan kebijakan akuntansi. *Restatements* yang disebabkan oleh peraturan perundangan, penerapan suatu standar akuntansi keuangan, *stock split*, dan *restatements* lainnya yang tidak dibuat untuk memperbaiki kesalahan akan dieliminasi. Selain itu, pertimbangan yang mendasari untuk memperluas batasan sampel adalah adanya intervensi manajemen dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan dengan tujuan tertentu. Inilah yang mengindikasikan adanya manajemen laba melalui sebuah pertimbangan (*judgment*) yang dibutuhkan dalam

mengestimasi sejumlah peristiwa ekonomi di masa depan serta kemudahan manajemen untuk memilih penerapan suatu metode akuntansi tertentu.

Adapun kesamaan dalam penelitian ini adalah pengujian variabel independen yang terdiri dari proporsi komisaris independen, tingkat kepemilikan *large shareholders*, kepemilikan pemerintah, dan audit independen. Variabel kontrol yang sama pun turut diujikan dalam penelitian ini, yaitu ROA, LEV, ATO, dan SIZE untuk mengendalikan pengaruh variabel lainnya.

2.5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori keagenan, pemegang saham sebagai prinsipal memberikan mandat kepada agen untuk menjalankan perusahaan. Agen dalam pengertian ini adalah manajer. Konflik keduanya akan muncul ketika manajer memiliki kepentingan yang berbeda dari pemegang saham. Pemegang saham ingin agar keputusan manajer adalah untuk memaksimalkan kekayaan mereka. Tetapi terkadang manajer berperilaku untuk mengambil keuntungan pribadinya.

Laporan keuangan adalah salah satu alat bagi prinsipal dalam menilai bagaimana sebenarnya kinerja yang dilakukan oleh agen, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25, Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi (IAI, 2009) menyatakan bahwa informasi tentang kinerja perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan serta menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas

dan aset di masa depan. Agen tentunya akan mendapatkan bonus yang “lebih” ketika mereka dapat mencapai target yang ditargetkan kepada mereka. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin besar “bonus” yang diberikan kepada agen. Sayangnya, inilah yang bisa memicu munculnya niat oportunistik manajemen dan menimbulkan asimetri informasi yang diterima oleh prinsipal atau *stakeholders* lainnya.

Financial restatements adalah salah satu contoh adanya kemungkinan oportunistik manajemen dan timbulnya asimetri informasi. Meskipun ini dimaksudkan untuk memberikan informasi keuangan yang lebih akurat dengan harapan yang lebih baik untuk melindungi kepentingan investor, manajemen juga dapat melancarkan tindakan untuk menguntungkan dirinya sendiri. *Financial restatements* dipandang sebagai cermin kredibilitas perusahaan yang buruk dan rendahnya kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Anderson dan Yohn, 2002). Selain itu, kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diragukan kualitasnya ketika perusahaan itu melakukan *earnings restatement* (Richardson *et al.*, 2002; Akhigbe *et al.*, 2005). Apabila kejadian seperti ini terus berulang dan meningkat, tentunya dapat menimbulkan efek negatif bagi perusahaan-perusahaan lainnya, seperti membangkitkan kecurigaan publik kepada akuntan dan menurunkan kepercayaan investor di pasar modal (Wu, 2003).

Untuk mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan investor luar, Jensen dan Meckling (1976) mengidentifikasi ada dua cara yang dapat digunakan, yaitu investor luar turut melakukan pengawasan

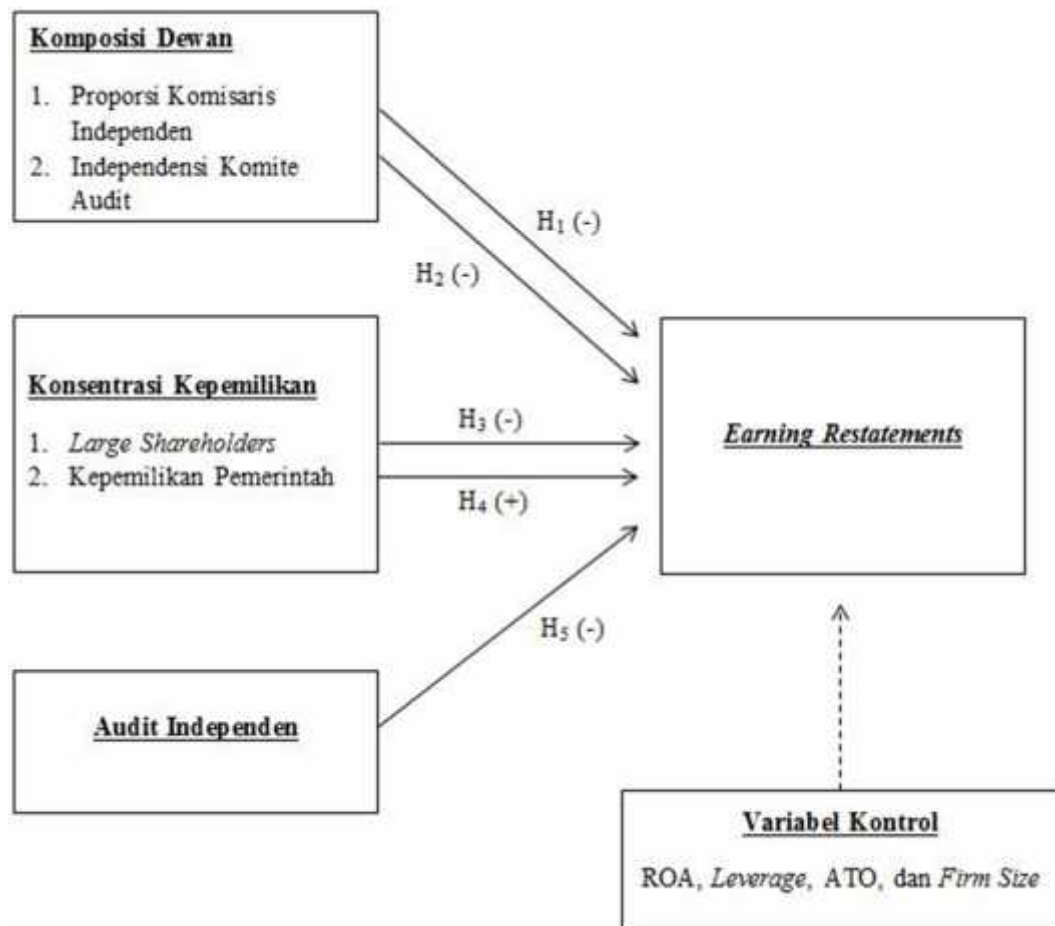
(*monitoring*) dan manajer sendiri melakukan pembatasan-pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*). Pada satu sisi, kedua kegiatan tersebut akan mengurangi kesempatan penyimpangan oleh manajer sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Sedangkan pada sisi yang lain keduanya akan memunculkan biaya sehingga akan mengurangi nilai perusahaan. Calon investor akan mengantisipasi adanya kedua biaya tersebut, ditambah dengan kerugian yang masih muncul meskipun sudah ada *monitoring* dan *bonding* yang disebut dengan *residual cost*. Antisipasi atas ketiga biaya yang didefinisikan sebagai biaya agensi ini nampak pada harga saham yang terdiskon pada saat perusahaan menjual sahamnya.

Mekanisme *corporate governance* adalah cara efektif yang dapat digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku oportunistik manajemen. Mekanisme-mekanisme tersebut meliputi pihak internal (komposisi dewan) maupun pihak eksternal (konsentrasi kepemilikan dan audit independen). Dechow *et al.* (1996) mengungkapkan bahwa laba akuntansi menjadi lebih handal dan informatif ketika perilaku oportunistik manajemen dikendalikan menggunakan sistem pengawasan yang baik. Peasnell *et al.* (2000a), Klein (2002b), dan Zhingzhong *et al.* (2011) menunjukkan bahwa sistem pengawasan melalui mekanisme *corporate governance* mampu mengurangi kapasitas manajemen untuk mengelola laba. Selain itu, *corporate governance* juga membantu investor dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham dan meningkatkan keandalan keuangan informasi dan integritas yang dari proses pelaporan keuangan (Watt dan Zimmerman, 1986).

Gambar 2.1. memberikan gambaran secara ringkas atas kerangka pemikiran penelitian ini. Beberapa variabel kontrol turut disertakan dalam penelitian ini, yaitu ROA, LEV, ATO, dan SIZE. Zhingzhong *et al.* (2011) menyatakan bahwa ROA dan ATO diujikan sebagai komponen untuk melihat teknik perataan laba (*income smoothing*) dengan melakukan *earnings restatement*. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah cenderung untuk melakukan *income maximimization*. Hal ini disebabkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah akan memberikan *image* yang kurang baik kepada perusahaan dan akibat kinerja dari seorang manajer tampak buruk dimata investor. Selain itu, manajer juga cenderung untuk menghindari pelaporan laba yang berfluktuasi agar dapat menggambarkan keadaan perusahaan dalam kondisi yang sehat.

LEV diujikan sebagai proxy kedekatan perusahaan untuk pelanggaran perjanjian utang (Koh, 2003). Manajer mungkin memiliki insentif untuk memanipulasi laba saat mereka lebih dekat pada kegagalan perjanjian utang (Press dan Weintrop, 1990). Harapannya adalah bahwa sebuah perusahaan yang mendekati perjanjian utang mereka lebih mungkin untuk mencegah gagalnya proses peminjaman utang (Watts dan Zimmerman, 1986). Sedangkan SIZE diujikan sebagai variabel kontrol dengan asumsi hipotesis biaya politik. Manajer perusahaan besar memiliki insentif yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil untuk mengurangi laba yang dilaporkan untuk mengurangi perhatian politik (Watts dan Zimmerman, 1986).

Gambar 2.1.
Model Kerangka Pemikiran



Sumber: Data sekunder (diolah 2013).

2.6. Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Komposisi Dewan dan Probabilitas *Earnings Restatement*

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-06/PM/2000 Peraturan Nomor VIII.G.7 menyatakan bahwa tanggungjawab atas pengendalian internal, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan terletak pada manajemen perusahaan. Scott dalam Guna dan Herawaty (2010) mengungkapkan bahwa

pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer untuk suatu tujuan tertentu disebut dengan manajemen laba. Terkait dengan informasi laba, *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1* dalam Guna dan Herawaty (2010) menyatakan bahwa informasi laba merupakan alat utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain itu, informasi tersebut juga membantu para pengguna laporan keuangan dalam menaksir *earnings power* perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, manajemen mempunyai kecenderungan melakukan tindakan untuk memberikan laporan keuangan yang atraktif.

Perilaku manajer yang melakukan manajemen laba dapat diminimalisir dengan menerapkan mekanisme *corporate governance*, salah satunya adalah melalui keberadaan komisaris independen. Fama dan Jensen (1983) menunjukkan bahwa jika komposisi dewan didominasi oleh manajemen dari dalam, maka pemegang saham cenderung akan kehilangan kekayaan yang lebih tinggi. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan membentuk komisaris independen. Beasley (1996) dan Dechow *et al.* (1996) menemukan bahwa struktur dewan dengan proporsi *non-executive directors* yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat yang lebih rendah dalam hal rekayasa laporan keuangan.

KNKG (2006) menyatakan bahwa untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Makna “independen” dijelaskan pada halaman berikutnya berdasarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (KNKG, 2006).

“Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.”

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku, seperti keberadaan komite audit. Kolins *et al.* (1991) menyatakan bahwa semakin independen komite audit, semakin besar kemungkinan untuk dapat melakukan pengawasan pelaporan keuangan secara lebih efektif karena komite audit tidak berada dalam kontrol manajemen. Isu independensi dalam komite audit muncul sebagai isu yang sangat penting agar komite ini dapat berjalan dengan efektif. Tetapi fakta bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan, bisa mengarah pada ketidakefektifan komite audit karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk meningkatkan proses pelaporan keuangan perusahaan tanpa persetujuan dewan.

McMullen dan Raghunandan dalam Antonia (2008) melakukan survei dengan cara membandingkan 51 perusahaan yang memiliki salah satu atau kedua masalah pelaporan keuangan, yaitu (1) tindakan peringatan dari SEC berkaitan dengan manajemen laba dan (2) melakukan *restatements* material dalam laba kuartalan, dengan 77 perusahaan yang tidak mengalami masalah pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak mengalami masalah pelaporan keuangan memiliki komite audit yang anggota dari pihak luar (*outside*) dan tingkat pendidikan CPA yang lebih banyak serta frekuensi rapat yang lebih intens dibandingkan perusahaan yang mengalami

masalah pelaporan keuangan. Artinya, secara empiris diperoleh bukti bahwa komite audit mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Dechow *et al.* dalam Antonia (2008) menunjukkan bahwa proporsi komite audit pada kelompok perusahaan kontrol lebih besar daripada proporsi komite audit pada kelompok perusahaan yang dikenai tindakan peringatan SEC. McMullen dalam Antonia (2008) menyatakan bahwa independensi komite audit ditemukan terkait dengan salah saji akuntansi, penyimpangan, dan tindakan ilegal yang lebih rendah. Selain itu, independensi komite audit juga dikaitkan dengan kemungkinan rendahnya penipuan pada laporan keuangan.

Teori keagenan mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Dengan adanya asimetri informasi ini, manajer dapat memaksimalkan nilai saham perusahaan melalui pengungkapan (*disclosure*) informasi akuntansi. Bagaimanapun juga manajer tidak selalu bertindak sesuai keinginan *shareholders*, sebagian dikarenakan oleh adanya *moral hazard* sehingga dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer).

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) merespon isu ini melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-29/PM/2004 yang mewajibkan bahwa anggota dewan komisaris dan komite audit adalah independen. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 mewajibkan bahwa setiap emiten atau perusahaan publik setidaknya memiliki komisaris independen sekurang-

kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris. Mengingat pentingnya isu independensi, kepatuhan, dan ketaatan emiten atau perusahaan *go public* terhadap peraturan yang ditetapkan oleh regulator, diharapkan mampu memantau gerak-gerik manajemen secara efektif demi menjaga kualitas informasi atas laporan keuangan itu sendiri. Berdasarkan situasi ini, peneliti mengajukan H_1 dan H_2 :

H_1 : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya *earnings restatement*.

H_2 : Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya *earnings restatement*.

2.6.2. Konsentrasi Kepemilikan dan Probabilitas *Earnings Restatement*

Konsentrasi kepemilikan adalah ukuran dari keberadaan *large shareholders* dalam perusahaan (Thomsen dan Pedersen, 2000). *Large shareholders* memiliki insentif yang lebih besar untuk memantau manajemen, karena biaya yang dibutuhkan lebih sedikit berkaitan dengan pengawasan manajemen dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan untuk kepemilikan modal yang besar dalam perusahaan. Ramsey dan Blair (1993) menunjukkan bahwa meningkatnya konsentrasi kepemilikan memberikan kewenangan yang lebih bagi *large shareholders* untuk memonitor manajer. Demsetz dan Lehn (1985) dan Stiglitz (1985) secara empiris mendukung pandangan ini dengan menemukan bahwa *large shareholders* memiliki insentif menanggung biaya tetap untuk mengumpulkan informasi dan terlibat dalam pengawasan manajemen.

Sebaliknya, *dispersed ownership* memiliki insentif yang lemah untuk memonitor manajemen (Maher dan Andersson, 2000). Dalam situasi dimana pemegang saham memegang saham rendah di perusahaan, pemegang saham tidak memiliki insentif yang cukup untuk memantau manajer karena biaya monitoring yang dibutuhkan akan melebihi keuntungan dari pemantauan manajer sendiri (Ramsey dan Blair, 1993; Hart, 1995). Bennedsen dan Wolfenzon (2000) menyatakan bahwa pemegang saham yang lebih besar diakui oleh pemegang saham minoritas sebagai sinyal pemantauan lingkungan yang lebih baik. Argumen mereka adalah konsisten dengan pandangan bahwa konsentrasi kepemilikan merupakan mekanisme *corporate governance* untuk memantau manajer (La Porta *et al.*, 1999).

Berdasarkan teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), keberadaan *large shareholders* diharapkan mampu untuk meredam laju manajemen laba (Demsetz dan Lehn, 1985; Stiglitz, 1985). Jika konsentrasi kepemilikan yang lebih tinggi mampu meningkatkan pemantauan terhadap manajemen, ini artinya konsentrasi kepemilikan yang lebih tinggi dapat mengurangi kapasitas manajemen untuk mengubah laba akuntansi dan meningkatkan keandalan laba itu sendiri. Oleh sebab itu, peneliti mengajukan H₃:

H₃: Tingkat kepemilikan *large shareholders* pada perusahaan *go public* non keuangan berpengaruh negatif terhadap probabilitas terjadinya *earnings restatement*.

Pengawasan yang dilakukan oleh *large shareholders* tidak bisa benar-benar berada di tempat disebabkan adanya “kepemilikan kolektif” dan menimbulkan masalah “ketidadaan kepemilikan”. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikendalikan oleh pemerintah diindikasikan memiliki masalah ini. Fama (1980) menyatakan bahwa sebagai agen dalam kepemilikan pemerintah, direksi yang mengelola berbagai perusahaan juga berfungsi sebagai pejabat di berbagai tingkat pemerintahan sehingga mereka tidak memiliki motivasi yang memadai untuk secara efektif memonitor dan mengevaluasi manajemen.

Zhingzhong *et al.* (2011) menyatakan bahwa peran mereka sebagai manajer puncak perusahaan dan juga seorang politisi, mereka tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi, tetapi juga promosi politik. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk bergaul dengan pejabat pemerintah dari tingkat yang lebih tinggi sehingga mereka kurang memperhatikan operasional perusahaan. Karena kinerja perusahaan juga merupakan salah satu kriteria penilaian mereka untuk promosi, tidak mengherankan ketika masa jabatan berakhir, mereka memiliki motivasi yang kuat untuk melebih-lebihkan laba.

Kepemilikan pemerintah yang besar dalam perusahaan BUMN *go public* (diatas 50%), menjadikan mereka sebagai *large shareholders* dalam perusahaan memang menjadi polemik tersendiri. Peran mereka yang diharapkan lebih efektif dalam memonitor dan mengevaluasi manajemen, justru diperoleh hasil yang sebaliknya. Oleh sebab itu, perusahaan cenderung kurang konsisten dan menyesatkan dalam melaporkan data keuangannya. Berdasarkan situasi diatas, maka peneliti mengajukan H₄ yang dijelaskan pada halaman berikutnya.

H₄: Perusahaan *go public* non keuangan berstatus “BUMN” memiliki probabilitas yang lebih tinggi terhadap terjadinya *earnings restatement* dibandingkan perusahaan *go public* non keuangan bukan BUMN.

2.6.3. Audit Independen dan Probabilitas *Earnings Restatement*

Proses audit yang dilakukan oleh KAP adalah kekuatan dari pihak luar perusahaan yang penting untuk mengontrol masalah keagenan (Jensen dan Meckling, 1976; Watts dan Zimmerman, 1986). Masalah keagenan yang kerap muncul adalah asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen, dapat mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Agen cenderung akan memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya.

Auditor mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara kepentingan investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan penyedia laporan keuangan. Data-data perusahaan akan lebih mudah dipercaya oleh investor dan pemakai laporan keuangan lainnya, apabila laporan keuangan yang mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan telah mendapat pernyataan wajar dari auditor. Peran auditor diperlukan untuk mencegah diterbitkannya laporan keuangan yang menyesatkan. Dengan menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit, para pemakai laporan keuangan dapat

mengambil keputusan dengan benar sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya (Siagian, 2009).

Peran auditor independen dalam menekan praktik manajemen laba terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu KAP dengan reputasi yang besar (saat ini diinterpretasikan sebagai KAP Big 4) dan KAP dengan reputasi yang lebih kecil (saat ini diinterpretasikan sebagai KAP Non-Big 4). DeAngelo (1981) mencatat bahwa KAP dengan reputasi yang besar lebih fokus pada reputasi mereka dan lebih mandiri dibandingkan KAP dengan reputasi lebih kecil. Becker *et al.* (1998) menemukan bahwa KAP Non-Big 6 memiliki toleransi lebih tinggi terhadap manajemen laba klien dari Big 6. Shockley (1981) juga menemukan bahwa KAP dengan reputasi lebih kecil memiliki risiko yang lebih tinggi untuk kehilangan independensi selama proses audit.

Qi *et al.* (2004) menunjukkan bahwa diskresioner akrual perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 lebih rendah dibanding perusahaan yang diaudit oleh KAP non-Big 4. Sedangkan Wu dan Li (2006) mencatat bahwa kualitas audit dari KAP Big 4 lebih tinggi dari KAP yang masuk dalam 10 besar (selanjutnya disebut KAP Big 10) di Cina dan kualitas audit KAP Big 10 lebih tinggi dibandingkan KAP lainnya selain KAP Big 4. Abdullah *et al.* (2010) dan Zhingzhong *et al.* (2011) menyatakan bahwa audit independen yang dilakukan oleh KAP Big 4 menunjukkan probabilitas yang lebih rendah terhadap terjadinya *restatements*. Selain itu, kualitas informasi yang dihasilkan juga lebih baik dibandingkan dengan KAP Non-Big 4.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa KAP besar memiliki independensi dan kompetensi audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil, serta menghasilkan kualitas audit dan informasi keuangan yang lebih baik. Oleh sebab itu, peneliti mengajukan H₅:

H₅: Perusahaan *go public* non keuangan yang diaudit oleh KAP Big 4 memiliki probabilitas yang lebih rendah terhadap terjadinya *earnings restatement*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Besaran variabel dependen bergantung pada besaran variabel independen. Besarnya perubahan yang disebabkan oleh variabel independen ini, akan memberikan peluang terhadap perubahan variabel dependen sebesar koefisien perubahan variabel independen. Variabel dependen yang diujikan dalam penelitian ini hanya difokuskan sebatas perusahaan yang melakukan *earnings restatement*. Zhingzhong *et al.* (2011) mengungkapkan bahwa terjadinya salah saji akuntansi dan niat oportunistik manajemen memiliki korelasi langsung dengan kegagalan *corporate governance* dan berujung pada kegagalan pelaporan keuangan.

Kegagalan pelaporan keuangan ini dicerminkan melalui intensitas perusahaan dalam melakukan *earnings restatement* yang merupakan indikasi manajer melakukan manajemen laba. Jika hal tersebut disebabkan oleh salah saji akuntansi, *financial restatements* berarti bahwa laporan keuangan yang telah disajikan sebelumnya mengandung salah saji material sehingga keandalan informasi keuangan tidak bisa diandalkan dan menyesatkan.

Beberapa kriteria mengenai *restatements* ditetapkan dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25, Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi (IAI, 2009), yaitu:

1. Kesalahan Mendasar,

Paragraf 30 menjelaskan bahwa kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau lebih periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Koreksi atas kesalahan tersebut biasanya dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

Paragraf 33 mensyaratkan bahwa dalam mengoreksi suatu kesalahan yang mendasar, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan saldo laba awal periode.

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi Lain,

Paragraf 37 menjelaskan bahwa pengguna laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan suatu perubahan selama beberapa periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Paragraf 45 mengatur bahwa suatu perubahan kebijakan akuntansi harus diterapkan secara retrospektif dengan melaporkan jumlah setiap penyesuaian yang terjadi yang berhubungan dengan periode sebelumnya sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode (*retained earnings*), kecuali jika jumlah tersebut tidak dapat ditentukan secara wajar. Informasi komparatif harus dinyatakan kembali, kecuali jika untuk melaksanakannya dianggap tidak praktis.

Earnings restatement yang disebabkan oleh peraturan perundangan, penerapan suatu standar akuntansi keuangan, *stock split*, dan *restatements* lainnya yang tidak dibuat untuk memperbaiki kesalahan akan dieliminasi. Selain itu, pertimbangan yang mendasari untuk memperluas batasan sampel adalah adanya intervensi manajemen dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan dengan tujuan tertentu, seperti memilih metode akuntansi yang digunakan. Inilah yang mengindikasikan adanya manajemen laba melalui sebuah pertimbangan (*judgment*) yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah peristiwa ekonomi di masa depan serta kemudahan manajemen untuk memilih penerapan suatu metode akuntansi tertentu.

Earnings restatement pada penelitian ini diukur menggunakan variabel dummy. Pemberian nilai pada variabel ini adalah “1” jika perusahaan melakukan *earnings restatement* dan nilai “0” jika perusahaan tidak melakukan *restatements*.

3.1.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat secara positif atau negatif. Variabel independen yang diujikan dalam penelitian ini adalah mekanisme *corporate governance*, baik aspek internal maupun eksternal perusahaan.

3.1.2.1. Komposisi Dewan

3.1.2.1.1. Proporsi Komisaris Independen

Bursa Efek Jakarta (BEJ) dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 mewajibkan bahwa setiap emiten atau perusahaan publik setidaknya memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris. Variabel proporsi komisaris independen dihitung berdasarkan persentase jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris.

3.1.2.1.2. Independensi Komite Audit

Salah satu elemen penting dalam keanggotaan komite audit adalah independensi. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, dijelaskan bahwa suatu komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan *go public*.

Independensi komite audit pada penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Nilai “1” diberikan jika seluruh anggota komite audit adalah independen dan nilai “0” jika yang terjadi sebaliknya.

3.1.2.2. Konsentrasi Kepemilikan

3.1.2.2.1. *Large Shareholders*

Large shareholders adalah kepemilikan sebagian besar saham perusahaan oleh satu pemegang saham dengan persentase kepemilikan yang paling besar. Variabel ini diukur dengan persentase kepemilikan saham terbesar dalam perusahaan yang meliputi keluarga, pemerintah, institusi keuangan dengan kepemilikan luas, perusahaan dengan kepemilikan luas, dan pemegang saham pengendali lainnya (seperti investor asing, koperasi, dan karyawan).

3.1.2.2.2. Kepemilikan Pemerintah

Menurut Wikipedia (n.d) Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah (atas nama negara) yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Pada beberapa persero, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat persero tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas.

Varibel dummy diberikan nilai “1” jika perusahaan dikendalikan langsung oleh pemerintah yang ditandai atas nama Pemerintah Negara Republik Indonesia (BUMN) dan nilai “0” jika yang terjadi sebaliknya.

3.1.2.3. Audit Independen

Pelaporan pelanggaran yang tercermin melalui salah saji tergantung atas keinginan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung kepada independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut. Auditor yang berasal dari KAP Big 4 dianggap lebih independen dan bisa mengurangi praktik manajemen laba. Sehingga kualitas audit yang dihasilkan menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan.

Pada penelitian ini audit independen diukur dengan menggunakan variabel dummy dengan nilai “1” untuk perusahaan *go public* yang diaudit oleh KAP Big 4 dan nilai “0” jika yang terjadi sebaliknya. Adapun nama-nama KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP Big 4 (Mada, 2013) adalah sebagai berikut:

1. Pricewaterhouse Coopers (PwC) yang berafiliasi dengan Hadi Sutanto & Rekan; Haryanto Sahari & Rekan; Tanudiredja Wibisana & Rekan.
2. Ernst & Young (EY) yang berafiliasi dengan Prasetio Utomo & Co; Prasetio, Sarwoko & Sandjaja; Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.
3. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan Hans Tuanakotta Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & Rekan; Osman Bing Satrio & Rekan.

4. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan Siddharta Siddharta & Widjaja; Siddharta & Widjaja.

3.1.3. Variabel Kontrol

3.1.3.1. Return on Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. ROA merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan aset secara keseluruhan (Chen *et al.*, dalam Tarigan, 2011). Rasio ini dihitung menggunakan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Jumlah Aset}}$$

3.1.3.2. Leverage (LEV)

Leverage merupakan biaya tetap yang digunakan untuk mendanai perusahaan. Variabel *leverage* diukur menggunakan *Total Debt to Total Assets* yang merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aset diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aset yang dibelanjai oleh hutang. Rasio ini dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Total Debt to Total Assets} = \frac{(\text{Hutang Lancar} + \text{Hutang Jangka Panjang})}{\text{Jumlah Aset}}$$

3.1.3.3. Asset Turnover Ratio (ATO)

Asset Turnover Ratio (ATO) adalah rasio dari jumlah pendapatan terhadap nilai buku dari jumlah aset. ATO merefleksikan efisiensi input yang dikonversikan menjadi *output* (Ghosh dan Mondal dalam Tarigan 2011). Rumus yang digunakan untuk menghitung ATO adalah:

$$ATO = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Jumlah Aset}}$$

3.1.3.4. Firm Size (SIZE)

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan gambaran besar atau kecilnya suatu perusahaan yang ditentukan dengan batas-batas tertentu yang sudah ditentukan. Proksi ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah logaritma natural dari besarnya jumlah aset yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun.

3.2. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini meliputi perusahaan *go public* non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2004 s/d 2010. Periode tahun buku yang berakhir 2004 s/d 2010 digunakan sebagai sampel dengan pertimbangan untuk memberikan gambaran terkini mengenai praktik *corporate governance* di Indonesia. Perusahaan *go public* yang bergerak dalam sektor keuangan sengaja tidak dimasukkan ke dalam sampel penelitian karena regulasi penyajian laporan keuangannya berbeda dengan sektor non keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Perbedaan tersebut dapat menjadi faktor yang menyebabkan hasil penelitian tidak valid.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel sesuai dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Sampel merupakan perusahaan *go public* non keuangan yang melakukan *earnings restatement* pada laporan tahunan untuk periode tahun buku yang berakhir 2004 s/d 2010.
2. Sampel yang telah dipilih melalui tahap pertama kemudian dipilih kembali berdasarkan kriteria *earnings restatement* yang telah ditetapkan.
3. Setelah melalui tahap ke-2, sampel dipilih kembali berdasarkan ketersediaan data variabel independen yang akan diujikan.
4. Sampel kemudian dipasangkan dengan perusahaan yang tidak melakukan *restatements* berdasarkan tahun fiskal, sektor industri, dan *firm size*.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan (*annual report*) untuk periode tahun buku yang berakhir 2004 s/d 2010. Data diperoleh dengan cara mengakses situs Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui websitenya <http://www.idx.co.id/>, Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Semarang, situs perusahaan yang bersangkutan, atau yang tersedia di Pojok BEI, Universitas Diponegoro.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari

catatan-catatan atau dokumen perusahaan yang berupa laporan tahunan. Sedangkan metode studi pustaka mengumpulkan data variabel-variabel yang akan diujikan melalui artikel, internet, jurnal, skripsi, dan tesis.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Uji Hipotesis

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Alasan menggunakan model regresi logistik karena dalam penelitian ini ingin menguji ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dimana variabel dependennya merupakan variabel dummy, sehingga alat analisis yang digunakan adalah regresi logistik.

Model logit digunakan untuk melihat probabilitas kemungkinan perusahaan akan melakukan tindakan *earnings restatement* dalam suatu periode dengan melibatkan unsur proporsi komposisi dewan, konsentrasi kepemilikan, dan audit independen pada periode yang sama. Variabel dependen menggunakan variabel dummy, yaitu “1” jika perusahaan melakukan *earnings restatement* dan nilai “0” jika yang terjadi sebaliknya. Perhitungan statistik dan pengujian hipotesis dengan analisis logistik regresi (*regression logistic*) dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan *software* pengolah data SPSS 19.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka persamaan regresi logistik yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{prob}(\text{Restated}_i = 1) = \alpha_0 + \alpha_1 \text{KOMIND}_i + \alpha_2 \text{ACIND}_i + \alpha_3 \text{BLOCK}_i + \alpha_4 \text{GOV}_i + \alpha_5 \text{BIG4}_i + \alpha_6 \text{ROA}_i + \alpha_7 \text{LEV}_i + \alpha_8 \text{ATO}_i + \alpha_9 \text{SIZE}_i + \varepsilon_i$$

dimana:

Restated = variabel dummy, nilai “1” jika perusahaan melakukan *earnings restatement*; nilai “0” jika perusahaan tidak melakukan *restatements*.

= konstanta.

KOMIND = persentase jumlah dewan komisaris independen berbanding dengan jumlah anggota dewan komisaris.

ACIND = variabel dummy, nilai “1” jika seluruh anggota komite audit adalah independen; nilai “0” jika yang terjadi sebaliknya.

BLOCK = persentase kepemilikan *large shareholders*.

GOV = variabel dummy, nilai “1” jika perusahaan dikendalikan langsung oleh pemerintah yang ditandai atas nama Pemerintah Negara Republik Indonesia (BUMN); nilai “0” jika yang terjadi sebaliknya.

BIG4 = variabel dummy, nilai “1” untuk perusahaan *go public* yang diaudit oleh KAP Big 4; nilai “0” jika yang terjadi sebaliknya.

ROA = laba bersih setelah pajak / jumlah aset.

LEV = (hutang lancar + hutang jangka panjang) / jumlah aset.

ATO = pendapatan bersih / jumlah aset.

SIZE = logaritma natural dari jumlah aset perusahaan pada akhir tahun.

= *error*.

i = perusahaan ke *i*.

3.5.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan umum. Tujuan pengujian ini adalah mempermudah pemahaman terhadap variabel-variabel yang digunakan. Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

3.5.3. Analisis Tabulasi Silang (*Crosstab*)

Tabulasi silang merupakan metode analisis kategori data yang menggunakan data nominal, ordinal, interval, serta kombinasi diantaranya. Analisis ini digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom. Ciri *crosstab* adalah adanya dua variabel atau lebih yang mempunyai hubungan secara deskriptif dan data penyajiannya berupa data kualitatif, khususnya yang berskala nominal (Ghozali, 2006).

3.5.4. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berfungsi untuk menguji adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Ada tidaknya multikolinieritas dapat diketahui dari matriks korelasi. Menurut Ghozali (2006) jika korelasi antar variabel independennya masih dibawah 95% maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas yang serius.

3.5.3. Uji Kelayakan Model

Ghozali (2006) menyatakan bahwa hipotesis yang digunakan untuk menilai model fit adalah:

H_0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data.

H_A : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.

Pengujian ini menggunakan *Hosmers and Lemeshow's Goodness of Fit Test* yang menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model Ghazali (2006). Jika nilai statistik sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai obeservasinya sehingga *goodness fit model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya.

3.5.4. Uji Kelayakan Keseluruhan Model

Menurut Ghozali (2006) ada beberapa model yang bisa dilakukan dalam menilai kelayakan keseluruhan model (*overall fit model*), dimana diantaranya:

1. *Chi Square*,

Tes statistik *chi square* digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood* pada estimasi model regresi. *Likelihood* (L) dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. L ditransformasikan menjadi $-2\log L$ untuk menguji hipotesis nol dan alternatif. Penggunaan nilai untuk keseluruhan model terhadap data dilakukan dengan membandingkan nilai $-2 \log likelihood$ awal (hasil *block number* 0) dengan nilai $-2 \log likelihood$ hasil *block number* 1. Dengan kata lain, nilai *chi square* didapat dari nilai $-2\log L_1 - 2\log L_0$. Apabila terjadi penurunan, maka model tersebut menunjukkan model regresi yang baik.

2. *Cox and Snell's* dan *Nagelkerke's R Square*,

Cox and Snell's R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran *R square* pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. *Nagelkerke R Square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell R Square* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *Cox and Snell R Square* dengan nilai maksimumnya. Nilai *Nagelkerke's R²* dapat diinterpretasikan seperti nilai *R²* pada *multiple regression*.

3. Matriks Klasifikasi,

Matriks klasifikasi menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen yang dalam hal ini, (1) jika perusahaan melakukan *earnings restatement* dan (0) jika perusahaan tidak melakukan *restatements*. Sedangkan pada baris menunjukkan menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen. Pada model sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2006).